



BNNP JABAR

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

BNN PROVINSI JAWA BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan produktivitas kinerja instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu mengatur dan menyesuaikan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi mempertanggungjawabkan pemerintah keberhasilan untuk dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik pada setiap entitas. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat sebagai Satuan Kerja Vertikal dari BNN RI merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) pada Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab di bidang P4GN berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BNN tahun 2020-2024. Renstra BNN sebagai pedoman untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program P4GN.

Laporan ini menyajikan hasil capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat selama satu tahun, atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan tugas bidang P4GN. Laporan ini dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang

mengatur, bahwa penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat.

Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat selaku penyelenggara negara di bidang P4GN, wajib menyampaikan hasil kinerjanya selama kurun waktu satu tahun. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2024 dengan 14 (Empatbelas) sasaran kegiatan, dan 19 (Sembilanbelas) indikator kinerja kegiatan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh *Stakeholder* di Provinsi Jawa Barat, secara umum berbagai target dapat berhasil dicapai dengan cukup baik. Untuk pelaporan realisasi implementasi Inpres 2 Tahun 2020 ke BNN RI, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat telah melaporkan yang berbasis Web dengan laman <https://inpresp4gn.bnn.go.id/> dan anggaran dengan laman monevgar.bnn.go.id.

Laporan ini dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada tahun-tahun mendatang. Akhirnya, Kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja secara keseluruhan.

Demikian Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha kita semua Amin

Bandung, Januari 2025
 Kepala Badan Narkotika Nasional
 Provinsi Jawa Barat

M. Arief Ramdhani, S.I.K.
 NRP. 67120331

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi.....	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis dan Rencana Program kerja.....	7
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	7
C. Perjanjian Kinerja.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BNN PROVINSI JAWA BARAT	
A. Analisis Capaian Sasaran	15
B. Akuntabilitas Keuangan	64
BAB IV PENUTUP	
Kesimpulan	69
LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat merupakan unit eselon II mandiri yang berkedudukan di Provinsi yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan melalui pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara efektif di daerah. Penetapan target dan sasaran kinerja yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Realisasi target kinerja ditetapkan melalui Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
2. Terwujudnya Manajemen Organisasi, Profesional, Produktif, dan Proporsional serta berkinerja tinggi.

Adapun capaian kinerja pada setiap indikator kinerja utama secara ringkas dapat kami laporkan sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran BNNP Jawa Barat tahun 2024 yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 25.433.416.000,- dan terdapat Pagu terblokir Rp. 32.863.000,
2. Pagu yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Rp. 2.000.000.000,- ;
3. Realisasi Anggaran tahun 2024 sebesar Rp.26.512.624.513,- atau sebesar 96,64%;
4. Dari 19 Indikator Kinerja kegiatan, sebanyak 9 indikator kinerja melebihi target, 7 indikator kinerja sesuai dengan target dan 3 indikator kinerja tidak memenuhi target yang ditetapkan;
5. Nilai kinerja anggaran 100 dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 87;
6. Target Capaian Output Tahun 2024 1.103 terealisasi 1.267 atau 114,87%;
7. Sisa anggaran merupakan penghematan dari Belanja Barang dan Belanja Pegawai.

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja:

- a. Penyelarasan jadwal kegiatan dalam rangka program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
- b. Melaksanakan distribusi tugas lintas seksi;

- c. Peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait lainnya dengan maksud untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan lintas aparat penegak hukum dan membuat aturan bersama lintas aparat penegak hukum dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan BNN dalam hal penanganan pecandu narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi;
- e. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional;
- f. Optimalisasi Pendidikan pelatihan bagi personil BNNP Jawa Barat;
- g. Membangun tim kerja yang solid di setiap Bagian/Bidang di lingkungan BNNP Jawa Barat;
- h. Optimalisasi penggunaan sistem berbasis web base sebagai sarana komunikasi, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja

BAB I

A. Gambaran Umum

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan *extraordinary* yang mendapat perhatian khusus dari seluruh negara di dunia, terorganisir lintas negara/internasional dan dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa. Sehingga kita perlu melakukan perlawanan terhadap salah satu kejahatan luar biasa yang menjadi tantangan negara-negara di dunia termasuk Indonesia.

Sejalan dengan program akselerasi Astacita Presiden Republik Indonesia “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” bahwa salah satu program dengan “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba”. Presiden juga mengamanatkan agar terus bekerja penuh semangat memerangi penyalahgunaan narkoba di berbagai kalangan seluruh pelosok Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dan bersih dari narkoba.

Provinsi Jawa Barat dengan luas 35.377,76 Km² menurut Data BPS Provinsi Jawa Barat didiami penduduk sebanyak 50,025 Juta Jiwa. Penduduk ini tersebar di 27 Kabupaten/Kota, 626 Kecamatan dan 5.962 Desa/Kelurahan. Sehingga dengan luas wilayah dan penyebaran penduduk perlu dilakukan strategi dalam penanganan narkoba di wilayah provinsi Jawa Barat. BNN mencatat adanya penurunan angka prevalensi penyalahguna narkoba pernah pakai sebesar 1,95% di tingkat nasional tahun 2021 menjadi hanya 1,73% penyalahguna narkoba di tahun 2024, sehingga terdapat penurunan sebesar 0,22%, yang artinya dari 10.000 orang penduduk Indonesia berumur 15-64 tahun terdapat 173 orang diantaranya terpapar narkoba selama satu tahun terakhir atau setara dengan 3,33 juta jiwa penduduk berumur 15-64 tahun.

Secara umum angka prevalensi setahun pakai dan pernah pakai laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba satu tahun terakhir pada laki-laki di tahun 2024 adalah 2,41%, yang artinya dari 10.000 orang penduduk laki-laki berumur 15-64 tahun terdapat 241 orang diantaranya terpapar narkoba selama satu tahun terakhir.

Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba selama satu tahun terakhir pada perempuan tahun 2024 adalah 1,03% yang artinya dari 10.000 orang penduduk perempuan berumur 15-64 tahun terdapat 103 orang diantaranya terpapar narkoba selama satu tahun terakhir. (*Paparan uji publik hasil penelitian BNN Tahun 2024*).

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat di tahun-tahun berikutnya. Hal ini sesuai dengan tujuan LAKIP yaitu sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi.

B. **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Perpres 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor SP DIPA- 066.01.2.682469/2024 tanggal 28 November 2024.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi

1. Tugas

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Tugas Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020, meliputi:

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi;

- Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Penyusunan rencana program dan anggaran BNNP;
- Evaluasi dan penyusunan laporan BNNP; dan
- Pelayanan administrasi.

3. Kewenangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020, Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat saat ini memiliki Badan Narkotika Nasional Kota/Kabupaten yang sudah vertikal sebanyak 14 Kota/kabupaten, yaitu

- 1) BNNK Bandung;
- 2) BNNK Bandung Barat;
- 3) BNNK Bogor;
- 4) BNNK Cimahi;
- 5) BNNK Cianjur;
- 6) BNNK Ciamis;
- 7) BNNK Cirebon;
- 8) BNNK Depok;
- 9) BNNK Garut;
- 10) BNNK Karawang;
- 11) BNNK Kuningan;
- 12) BNNK Sukabumi;
- 13) BNNK Sumedang;
- 14) BNNK Tasikmalaya

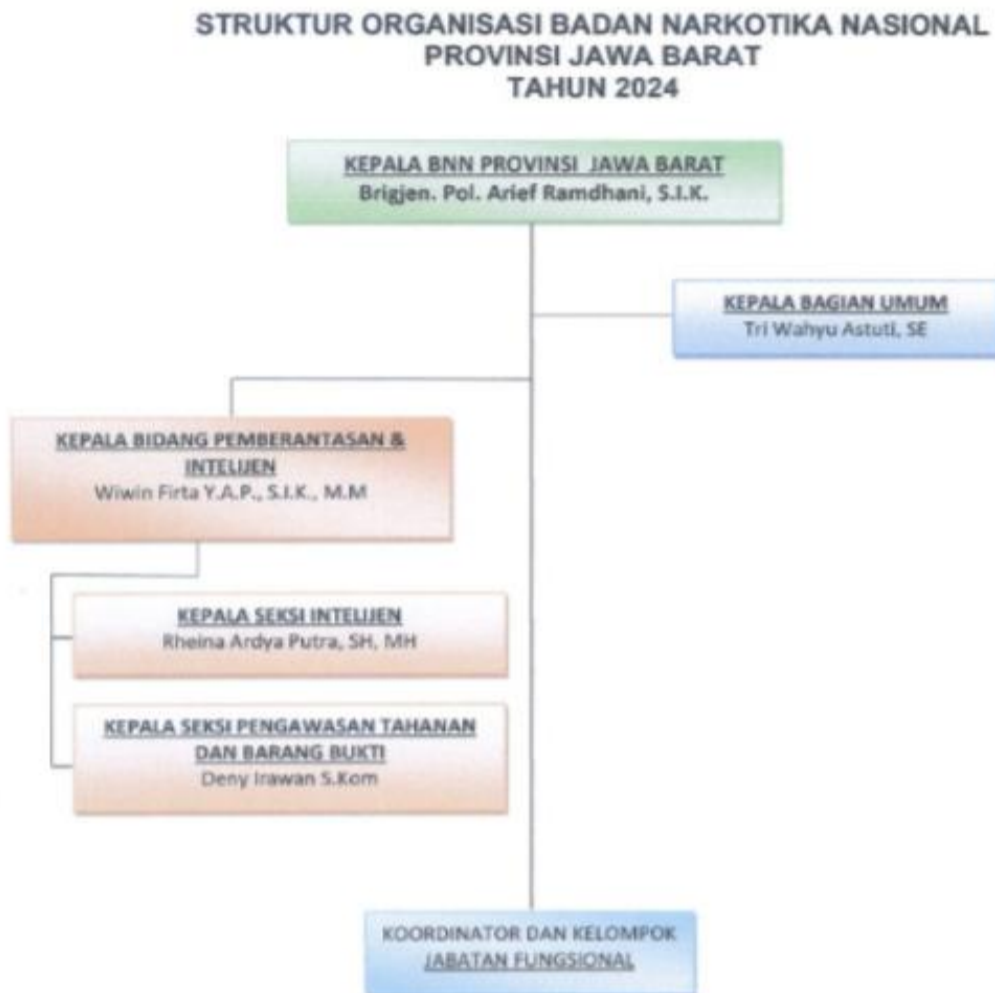
Dan Masih terdapat 13 Kota/Kabupaten yang belum menjadi instansi vertikal.

4. Struktur Organisasi

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, terdiri dari:

1. Kepala;
2. Bagian Umum;
3. Bidang Pemberantasan dan Intelijen;
4. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024**



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS / RENCANA PROGRAM KERJA

Rencana strategis (Renstra) Badan Narkotika Nasional tahun 2020-2024 menetapkan tujuan dalam periode waktu 2020-2024 yaitu :

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat Dari Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba
2. Mewujudkan Transformasi Pelayanan Publik yang Berkualitas.

Sedangkan sasaran strategis BNN yaitu :

1. Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
2. Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi.

Adapun Rencana Program Kerja (Renproja) BNN Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari rencana strategis BNN tahun 2020-2024, program tersebut adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN serta Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Tabel Rencana Kerja BNN Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 kami sajikan dalam lampiran laporan ini.

B RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran Renproja dalam target tahunan dan media penghubung antara renproja dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam 1 (satu) tahun.

Untuk tahun 2024 BNN Provinsi Jawa Barat memiliki rencana kinerja tahunan sebagai berikut:

Tabel II.1 rencana Kinerja Tahunan BNN Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	14 Kabupaten/Kota	1.285.000.000
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	14 Kabupaten/Kota	1.6040.700.000
3.	Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan indeks kemandirian partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	14 Kabupaten/Kota	3.285.632.000
4.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	84.600.000
		Meningkatkan upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	3,1 Indeks	

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
5.	Kegiatan penguatan rehabilitasi instansi pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 orang	226.575.000
7.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	4 Lembaga	2.558.993.000
		Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	30 Unit	
8	Kegiatan Pasca Rehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %	228.775.000
		Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,29 Indeks	
9.	Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkoba	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	22 Berkas Perkara	920.000.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
10.	Kegiatan Pelaksana Intelijen Berbasis Teknologi	Meningkatnya Pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	1 Peta Jaringan	220.000.000
10	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100%	271.280.000
		Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, barang bukti narkoba dan non narkoba	100%	
12.	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	98,50 Indeks	20.078.100.000
		Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN kabupaten/kota di wilayah provinsi dengan nilai IKPA mencapai target	14 Kabupaten/Kota	
13.	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	-	-	-	186.770.000
14.	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks	198.331.000
		Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN kabupaten/kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	10 Kabupaten/Kota	

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
15.	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	-	-	-	20.011.116.000
16.	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	-	-	-	160.000.000
17.	Program Pembangunan Zona Integritas	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai zona integritas BNN berdasarkan penilaian internal	83 Indeks	-

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan yang berisikan penugasan dan pimpinan unit organisasi yang lebih tinggi kepada pimpinan unit organisasi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. PK menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, PK dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, maka Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahunan BNN Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	14 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	14 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan indeks kemandirian partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	14 Kabupaten/Kota

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada”	1 Kawasan
5	Meningkatkan upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	3,1 Indeks
6	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	4 Lembaga
8	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	30 Unit
9	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%
10	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3.29 Indeks
11	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	22 Berkas Perkara
12	Meningkatnya pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	1 Peta Jaringan
13	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
14	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100%
15	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	98,50 Indeks
13	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN kabupaten/kota di wilayah provinsi dengan nilai IKPA mencapai target	14 Kabupaten/Kota
16	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks
17	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN kabupaten/kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	10 Kabupaten/Kota
19	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai zona integritas BNN berdasarkan penilaian internal	83 Indeks

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A Analisis Capaian Sasaran

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah disepakati antara Kepala BNN RI dan Kepala BNN Provinsi Jawa Barat terdapat 16 (Enam belas) sasaran Kegiatan, dengan indikator kinerja sebanyak 19 (Sembilan belas) indikator kinerja. Gambaran capaian keberhasilan atas apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebagaimana table berikut ini:

Tabel. III.1 Capaian sasaran kegiatan BNN Provinsi Jawa Barat TA 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	14 Kab/Kota	13 Kab/Kota	93%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100%
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	1 Kawasan	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target
1	2	3	4	5	6
5.	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	3,1 Indeks	3,14 Indeks	101%
6	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	16 Orang	160%
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	4 Lembaga	4 Lembaga	100%
8	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	30 Unit	31 Unit	103%
6	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	74,20%	109%
10	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,29 Indeks	3,53 Indeks	107%
11	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	22 Berkas	29 Berkas	131%
12	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	1 Peta Jaringan	1 Peta Jaringan	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target
1	2	3	4	5	6
13	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100%	100%	100%
14	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100%	100%	100%
15	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98,50 Indeks	98.70 Indeks	100,2%
16	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan nilai IKPA mencapai target	14 Kab/Kota	10 Kab/Kota	71%
17	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks	100 Indeks	114%
18	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	10 Kab/ Kota	14 Kab/ Kota	140%
19	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Mencapai zona integritas BNN berdasarkan penilaian internal	83 Indeks	72,42 Indeks	87,25%

Dari 19 (Sembilan belas) Indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan:

1. 9 indikator kinerja melebihi target yang ditetapkan;
2. 7 indikator sesuai target yang diharapkan;
3. 3 indikator kinerja di bawah target yang ditetapkan.

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat selama tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun

berjalan. Analisis disajikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2024 dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik yang berisi analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan periode tahun sebelumnya dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target. Adapun pengukuran capaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sebagaimana uraian berikut :

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diimplementasikan dalam indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	14 Kab/Kota	13 Kab/Kota	93%

Definisi dan pengukuran kinerja dari sasaran kegiatan ini adalah Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindar dari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba. Sedangkan Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja diperoleh berdasarkan hasil pengukuran Ketahanan Diri Remaja yang meliputi Dimensi Self Regulation, Assertiveness dan Reaching Out dan

konteks pelaksanaan Standar Aktivitas BNNP-BNNK dalam Kegiatan Pengelolaan Informasi (data dukung) yang dibandingkan dengan Data Sekunder yaitu Kasus Narkoba Remaja (pada lokus kegiatan), Kegiatan Positif Remaja serta Jumlah Remaja yang mengikuti Kegiatan Positif. Nilai akhir dari Indeks Ketahanan Diri Remaja merupakan capaian kinerja yang diperoleh Direktorat Informasi dan Edukasi dengan fokus Remaja di lingkungan Sekolah dan Kampus. Mekanisme pengukurannya dilakukan dengan pengumpulan data berupa kuesioner dalam aplikasi berbasis web.

Outcome pada kegiatan ini menitikberatkan pada meningkatnya kapasitas guru bimbingan konseling untuk mengintegrasikan nilai – nilai ketahanan anti narkoba kepada peserta didik melalui pembelajaran di sekolah dan terlaksananya rencana aksi P4GN sehingga dapat meminimalisir potensi perilaku beresiko khususnya dalam penyalahgunaan narkoba di kalangan anak remaja dan perlunya meningkatnya peran sekolah yang ditunjuk sebagai peserta pelatihan dengan mengoptimalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang sehat, aman dan bersih dari penyalahgunaan narkoba.

Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNN Kab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota. (*Surat Deputi Cegah BNN RI No.4729 Tanggal 27 Desember 2024*).

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi yang dapat dijadikan pengukuran adalah kegiatan yang bersifat tatap muka (Insert Konten, Talk Show, dan Pagelaran atau kegiatan lain yang dapat mengumpulkan data peserta melalui Teknik snowball pada kegiatan di Sekolah atau Kampus) hingga dapat memperoleh jangkauan peserta/sebagai responden agar alat ukur (kuisisioner) dapat dijalankan. Target dari masing-masing kegiatan adalah 50 (lima puluh) orang (sesuai Standar Aktivitas). Kuesioner akan berbentuk aplikasi berbasis web bernama Dektari, agar dapat mudah diakses oleh peserta/responden (Online system), namun apabila tidak dapat terselenggara secara online maka pelaksana pengukuran bertanggung jawab untuk menginput Kuesioner secara online ke dalam sistem aplikasi berbasis web. Selanjutnya petugas/pelaksana pengukuran mengarahkan agar

aplikasi kuesioner tersebut dapat terisi dan menjadi kontribusi bagi nilai ketahanan diri di lingkungannya masing-masing. Dengan demikian dalam pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja tidak dibutuhkan kegiatan khusus dalam pengumpulan data, cukup peserta dalam kegiatan pengelolaan informasi dan edukasi dan sejenisnya dapat menjadi responden dalam pengukuran ini.

Adapun klasifikasi Hasil Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja adalah sebagai berikut:

- a. Kategori Sangat Tinggi $\geq 53,71$
- b. Kategori Tinggi 49,74 – 53,50
- c. Kategori Rendah 45,98 – 49,73
- d. Kategori Sangat Rendah $\leq 45,97$

Kendala pada capaian indikator kinerja ini Keterbatasan akses seperti jaringan internet khususnya di daerah pesisir, beberapa lembaga pendidikan membuat aturan penggunaan perangkat gawai yang ketat dan terbatas dan beberapa responden ada keengganan untuk mengisi kuesioner secara objektif karena dirasa privasi mereka terganggu dan khawatir dinilai negatif di sekolah.

Dengan kondisi tersebut upaya-upaya yang kami lakukan adalah Menggunakan kuesioner manual, Mengoptimalkan peran dari relawan dan penggiat anti narkoba dari instansi pendidikan dan membangun kolaborasi dengan organisasi profesi psikiater anak dalam program P4GN berkelanjutan di lingkungan pendidikan

Pada tahun 2024 Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah BNN Provinsi Jawa Barat tercapai 13 kab/kota dari target sebanyak 14 Kab/Kota atau sebesar 93% dengan indeks rata-rata 52,56 Dektari Provinsi Jabar berkategori Tinggi dengan rincian sebagai berikut :

Satuan Kerja	Target 2024	Capaian 2024	Kategori
--------------	----------------	-----------------	----------

BNNP Jawa Barat	-	47,76	Rendah
BNN Kota Bandung	57,72	56,4	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Bandung Barat	54,63	54,01	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Bogor	55,67	55,52	Sangat Tinggi
BNN Kota Cimahi	56,25	53,62	Tinggi
BNN Kabupaten Cianjur	55,31	55,25	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Ciamis	52,53	55,01	Sangat Tinggi
BNN Kota Cirebon	54,1	55,91	Sangat Tinggi
BNN Kota Depok	52,18	54,87	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Garut	55,34	55,72	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Karawang	52,99	48,59	Rendah
BNN Kabupaten Kuningan	54,37	56,18	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Sumedang	54,42	52,10	Tinggi
BNN Kabupaten Sukabumi	52,0	55,72	Sangat Tinggi
BNN Kota Tasikmalaya	52,16	51,02	Tinggi
Dektari Provinsi Jabar	-	53,85	Tinggi

Adapun pada tahun 2022 dan 2023, Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah BNN Provinsi Jawa Barat tercapai 9 kab/kota dari target sebanyak 3 Kab/Kota atau sebesar 300%.

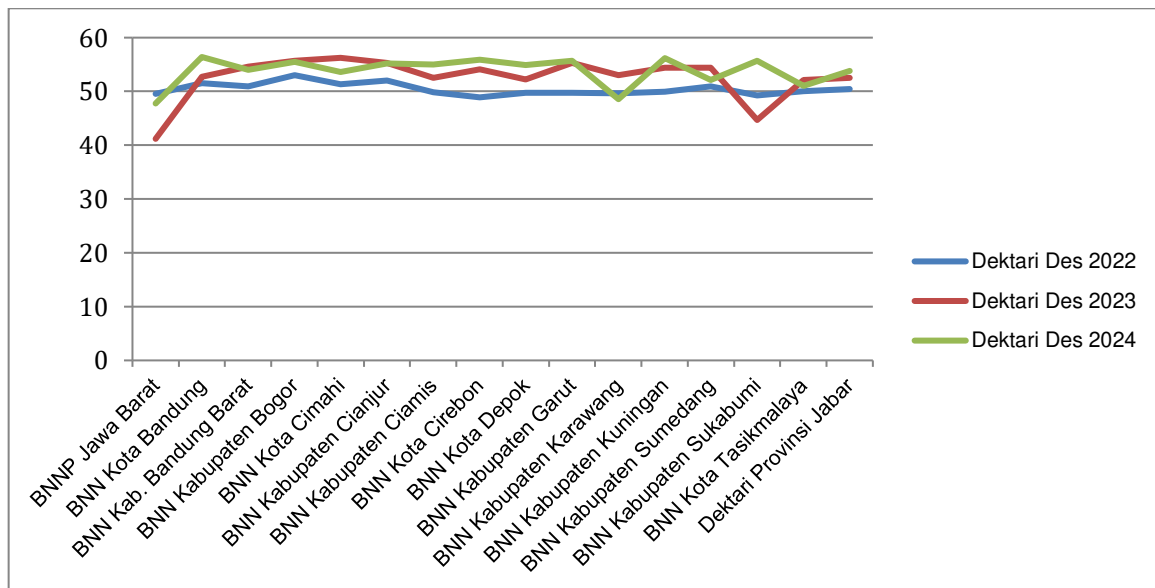
Satuan Kerja	Dektari Per Desember 2022	Kategori Dektari Per Desember 2022	Dektari Per Desember 2023	Kategori Dektari Per Desember 2023
BNNP Jawa Barat	49.57	Rendah	41,19	Sangat Rendah
BNN Kota Bandung	51.54	Rendah	52,72	Tinggi
BNN Kab. Bandung Barat	50.93	Tinggi	54,63	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Bogor	53.02	Rendah	55,67	Sangat Tinggi

BNN Kota Cimahi	51.31	Rendah	56,25	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Cianjur	52.02	Sangat Tinggi	55,31	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Ciamis	49.84	Tinggi	52,53	Tinggi
BNN Kota Cirebon	48.9	Tinggi	54,10	Sangat Tinggi
BNN Kota Depok	49.73	Rendah	52,18	Tinggi
BNN Kabupaten Garut	49.72	Rendah	55,34	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Karawang	49.63	Rendah	52,99	Tinggi
BNN Kabupaten Kuningan	49.9	Rendah	54,37	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Sumedang	50.91	Rendah	54,42	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Sukabumi	49.28	Rendah	44,65	Sangat Rendah
BNN Kota Tasikmalaya	50.06	Rendah	52,16	Tinggi
Dektari Provinsi Jabar	50.43	Rendah	52,56	Tinggi

Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba tahun 2022, 2023 dan 2024 dapat kami sampaikan dengan rincian sebagai berikut:

Satan Kerja	Dektari Des 2022	Dektari Des 2023	Dektari Des 2024
BNNP Jawa Barat	49,57	41,19	47,76
BNN Kota Bandung	51,54	52,72	56,40
BNN Kab. Bandung Barat	50,93	54,63	54,01
BNN Kabupaten Bogor	53,02	55,67	55,52
BNN Kota Cimahi	51,31	56,25	53,62
BNN Kabupaten Cianjur	52,02	55,31	55,25
BNN Kabupaten Ciamis	49,84	52,53	55,01
BNN Kota Cirebon	48,90	54,10	55,91
BNN Kota Depok	49,73	52,18	54,87
BNN Kabupaten Garut	49,72	55,34	55,72
BNN Kabupaten Karawang	49,63	52,99	48,59
BNN Kabupaten Kuningan	49,90	54,37	56,18

BNN Kabupaten Sumedang	50,91	54,42	52,10
BNN Kabupaten Sukabumi	49,28	44,65	55,72
BNN Kota Tasikmalaya	50,06	52,16	51,02
Dektari Provinsi Jabar	50,43	52,56	53,85



Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022, 2023 dan 2024, capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2024 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya pemahaman dan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba; tingkat kepedulian masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah dalam upaya dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; Meningkatnya peranan mitra masyarakat dalam upaya pencegahan; meningkatnya koordinasi tingkat pusat dalam hal fasilitas yang meliputi bimbingan teknis, penyediaan materi dan acuan pelaksanaan informasi dan edukasi P4GN.

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100%

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran kegiatan yaitu jumlah institusi / lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba. Adapun target dan realisasinya disajikan sebagai berikut:

Definisi dan pengukuran kinerja dari sasaran kegiatan ini adalah Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal. sedangkan Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan keluarga secara sampling pada 14 Kabupaten/Kota wilayah kerja BNNK dengan menggunakan instrumen SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaires), PAFAS (Parent And Family Adjustment Scales), dan CYRM (Child and Youth Resilience Measure).

Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektera yaitu setiap BNNP dan BNN Kab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota

Adapun Klasifikasi Hasil Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga adalah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi 88,31 – 100,00.
- 2) Kategori tinggi 76,61 – 88,30

- 3) Kategori Rendah 65,00 – 76,60
- 4) Kategori sangat rendah 25,00 – 64,99

salah satu kendala yang dihadapi dalam pencapaian target adalah kurangnya pelatihan peningkatan kapasitas pegawai sebagai fasilitator.

Sedangkan upaya strategi pencapaian target adalah dengan berkoordinasi dan lebih meningkatkan sinergitas dengan stakeholder terkait dan Memfasilitasi percepatan penerbitan PERDA tentang P4GN oleh Kesbangpol dan Biro Kesra Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Upaya ini akan diperkuat dengan menghadirkan seluruh mitra P4GN dan *Stakeholder* melalui forum Komunikasi P4GN

Pada tahun 2024 Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah BNN Provinsi Jawa Barat tercapai 14 kab/kota dari target sebanyak 14 Kab/Kota atau sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

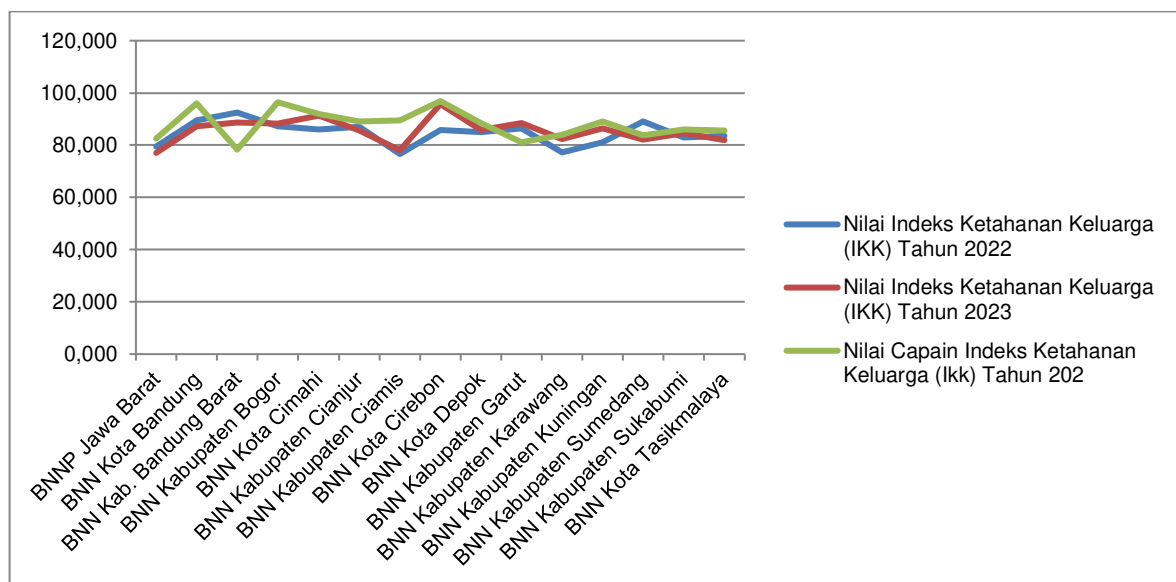
Satuan Kerja	Target Capain Indeks Ketahanan Keluarga (Ikk) Tahun 202	Nilai Capain Indeks Ketahanan Keluarga (Ikk) Tahun 2024	Kategori Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) Tahun 2024
BNNP Jawa Barat	-	82,589	Tinggi
BNN Kota Bandung	87,321	96.071	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Bandung Barat	88,571	78,304	Tinggi
BNN Kabupaten Bogor	88.304	96,339	Sangat tinggi
BNN Kota Cimahi	91.25	91.88	Sangat tinggi
BNN Kabupaten Cianjur	85.625	89.018	Sangat tinggi
BNN Kabupaten Ciamis	78,700	89,464	Sangat tinggi
BNN Kota Cirebon	95.714	96,875	Sangat tinggi
BNN Kota Depok	85.804	88.363	Tinggi
BNN Kabupaten Garut	88.393	81.071	Tinggi
BNN Kabupaten Karawang	82.321	84,018	Sangat tinggi
BNN Kabupaten Kuningan	86.339	89.107	Sangat tinggi
BNN Kabupaten Sumedang	82,054	83,839	Tinggi

BNN Kabupaten Sukabumi	84.643	86,071	Tinggi
BNN Kota Tasikmalaya	81,875	85,625	Tinggi

Adapun pada tahun 2022 dan 2023, Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah BNN Provinsi Jawa Barat tercapai 14 kab/kota dari target sebanyak 14 Kab/Kota atau sebesar 100%.

Satuan Kerja	Nilai Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) Tahun 2022	Kategori Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) Tahun 2022	Nilai Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) Tahun 2023	Kategori Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) Tahun 2023
BNNP Jawa Barat	79,554	Tinggi	77,054	Tinggi
BNN Kota Bandung	89,464	Tinggi	87,321	Tinggi
BNN Kab. Bandung Barat	92,50	Sangat Tinggi	88,571	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Bogor	87,143	Tinggi	88,304	Tinggi
BNN Kota Cimahi	85,982	Tinggi	91,250	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Cianjur	87,054	Tinggi	85,625	Tinggi
BNN Kabupaten Ciamis	76,607	Rendah	78,125	Tinggi
BNN Kota Cirebon	85,893	Tinggi	95,714	Sangat Tinggi
BNN Kota Depok	84,911	Tinggi	85,804	Tinggi
BNN Kabupaten Garut	86,429	Tinggi	88,393	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Karawang	77,232	Tinggi	82,321	Tinggi
BNN Kabupaten Kuningan	81,16	Tinggi	86,339	Tinggi
BNN Kabupaten Sumedang	89,107	Sangat Tinggi	82,054	Tinggi
BNN Kabupaten Sukabumi	82,946	Tinggi	84,643	Tinggi
BNN Kota Tasikmalaya	83,661	Tinggi	81,875	Tinggi

Sedangkan ada tahun 2022, Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah BNN Provinsi Jawa Barat tercapai 13 kab/kota dari target sebanyak 14 Kab/Kota atau sebesar 93 %. Perbandingan pencapaian indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah BNN Provinsi Jawa Barat dapat kami sajikan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut :



Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022, 2023 dan 2024, capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2024 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya pemahaman dan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba; tingkat kepedulian masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah dalam upaya dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; Meningkatnya peranan mitra masyarakat dan stakeholder dalam upaya menciptakan ketahanan keluarga melalui kegiatan yang terintegrasi; Meningkatnya koordinasi tingkat pusat dalam hal fasilitas yang meliputi bimbingan teknis, penyediaan materi dan acuan pelaksanaan informasi dan edukasi P4GN

Capaian Outcome pada program ini Meningkatnya kemampuan peran orang tua untuk membantu anak mencapai hasil yang di inginkan dengan modifikasi perilaku, kognisi dan keadaan emosional pada anak melalui dimensi keyakinan (*beliefs system*), dimensi proses organisasi (*organizational process*) dan dimensi proses komunikasi

(*communication/problem – solving processes*), sehingga orang tua dan anak saling memberikan dukungan dan membentuk suatu ketahanan anti narkoba/daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkoba di dalam keluarga.

Selain itu diharapkan peran pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat pada terbentuknya regulasi dari pemerintah daerah setempat untuk mempengaruhi kebijakan – kebijakan strategis dalam mendukung program P4GN di daerah serta terjalinnya sinergitas antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah daerah setempat, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan rencana aksi P4GN di daerah.

Meningkatnya peran pemerintah daerah setempat dan kerja sama dengan melibatkan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil dalam bentuk pertukaran informasi, bantuan teknis atau dukungan pendanaan untuk mendukung program P4GN di daerah.

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu Nilai Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) masyarakat di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN. Adapun target dan realisasinya disajikan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
3.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100%

Definisi dan pengukuran kinerja dari sasaran kegiatan ini adalah Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan Pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba;

Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut:

- a. SDM; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- b. Metode; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanaan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
- c. Anggaran; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.
- d. Material; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- e. Sistem (Kebijakan); adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
- f. Aktivitas; adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

Adapun Klasifikasi Nilai Indeks Kemandirian Partisipatif adalah sebagai berikut:

1. Tidak Mandiri : 1.00 – 1.75
2. Kurang Mandiri : 1.76 – 2.50
3. Mandiri : 2.51 – 3.25
4. Sangat Mandiri : 3.26 – 4.00

Pada tahun 2024 Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah BNN Provinsi Jawa Barat tercapai 14 kab/kota dari target sebanyak 14 Kab/Kota atau sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

Satker	Target Nilai Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Tahun 2024	Capaian Nilai Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Tahun 2024	Kategori
BNNP Jawa Barat	-	3,53	Sangat Mandiri
BNN Kota Bandung	3,56	3,80	Sangat mandiri
BNN Kab. Bandung Barat	3,76	3,76	Sangat Mandiri
BNN Kabupaten Bogor	3,43	3,50	Sangat Mandiri
BNN Kota Cimahi	3,54	3,55	Sangat Mandiri
BNN Kabupaten Cianjur	3,30	3,51	Sangat Mandiri
BNN Kabupaten Ciamis	3,56	3,59	Sangat Mandiri
BNN Kota Cirebon	3,30	3,91	Sangat mandiri
BNN Kota Depok	3,50	3,62	Sangat Mandiri
BNN Kabupaten Garut	3,62	3,78	Sangat Mandiri
BNN Kabupaten Karawang	3,82	3,60	Sangat Mandiri
BNN Kabupaten Kuningan	3,50	3,33	Sangat Mandiri
BNN Kabupaten Sumedang	3,37	3,71	Sangat Mandiri
BNN Kabupaten Sukabumi	3,82	3,83	Sangat Mandiri
BNN Kota Tasikmalaya	3,46	3,68	Sangat Mandiri

Adapun pada tahun 2024, Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah BNN Provinsi Jawa Barat tercapai 14 kab/kota dari target sebanyak 14 Kab/Kota atau sebesar 100%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023, capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2024 sama sama mencapai target yang ditentukan. Hal ini dikarenakan:

- adanya keterlibatan setiap unsur dari berbagai aspek lingkungan yang bersinergi dalam kegiatan P4GN di setiap lingkungan yaitu Pendidikan, Pemerintah, Masyarakat dan Swasta.
- Keterlibatan pimpinan dan pengambil kebijakan dari setiap lingkungan membuat regulasi mengenai kegiatan P4GN di Provinsi Jawa Barat karena

terselenggaranya program P4GN juga sangat penting sehingga tercipta Jabar Bersinar.

- c. Kesungguhan dari para penggiat untuk melaksanakan tugas mulia sebagai penggiat anti narkoba dilingkungan masing masing sehingga menjadikan Provinsi Jawa Barat bersih dari Narkoba.
- d. Adanya tindak lanjut dan monev setelah kegiatan yang menjadikan stimulasi untuk menjadikan Provinsi Jawa Barat yang Tahan terhadap Narkoba.

Capaian Outcome pada pelaksanaan program ini antara lain :

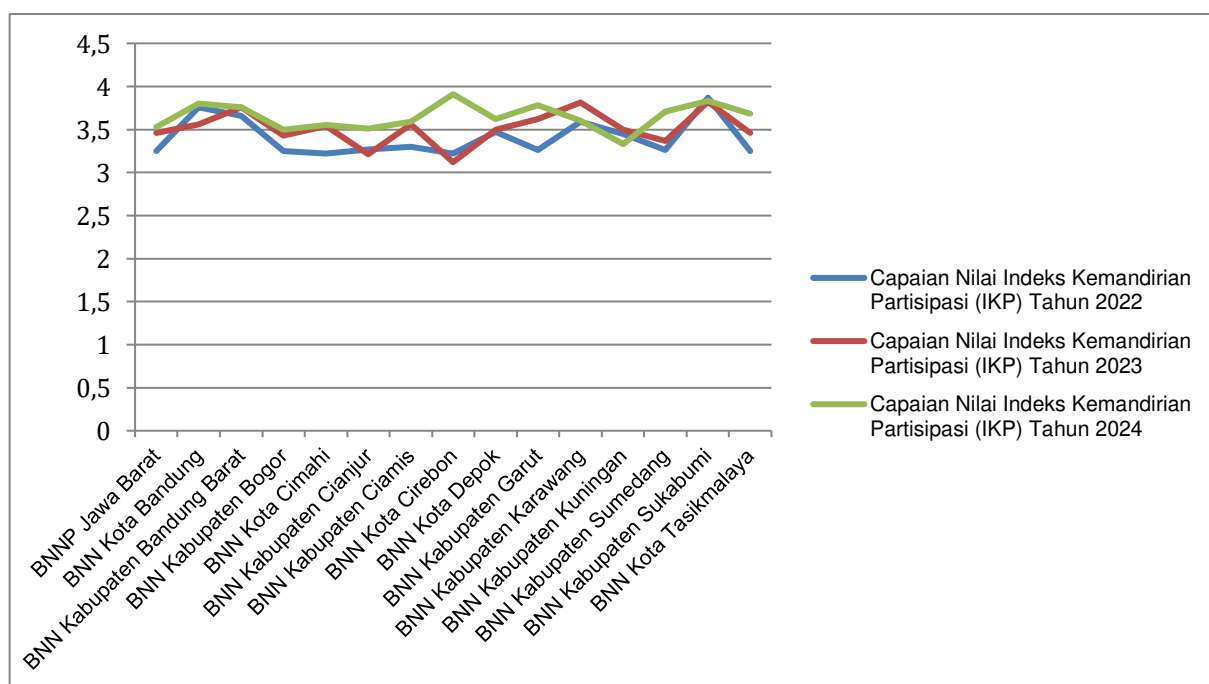
1. Terjalannya kerjasama antara BNNP Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat dan BKD Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan program P4GN yaitu dengan terbentuknya Instruksi Gubernur Nomor : 4/KA.11.03/Kesra tentang Rencana Aksi Daerah P4GN.
2. Adanya keterlibatan masyarakat dalam hal ini lingkungan pendidikan dan swasta dalam KOTAN untuk mewujudkan lingkungan bersih dari penyalahgunaan narkoba seperti pelaksanaan sosialisasi P4GN dan tes urine di ISBI, POLMAN, PT.Fengtay dan PT. Indah logistik.
3. Terbentuknya Penggiat P4GN lingkungan swasta dan pendidikan yg memiliki motivasi, kemampuan dan komitmen yang tinggi dalam menciptakan lingkungan yg bersih dari penyalahgunaan narkoba secara mandiri.

Hal hal yang menjadi kendala pelaksanaan program Tidak adanya Anggaran untuk Kegiatan Asistensi Program Pemberdayaan Masyarakat BNNP selaku pembina fungsi kepada BNN Kab/Kota yang merupakan salah satu upaya untuk mendorong Kab/Kota meningkatkan Kemandirian Partisipasinya dalam P4GN. Sementara itu upaya yang dilakukan adalah Melaksanakan Asistensi, Diskusi dan Koordinasi dengan BNN Kab/Kota pada Kegiatan Rakernis Program Pemberdayaan Masyarakat.

Perbandingan capaian kinerja pada sasaran kegiatan ini dengan tahun 2022 dan 2023 dapat kami sajikan sebagai berikut :

Satker	Capaian Nilai Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Tahun 2022	Kategori	Capaian Nilai Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Tahun 2023	Kategori	Capaian Nilai Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Tahun 2024	Kategori
--------	---	----------	---	----------	---	----------

BNNP Jawa Barat	3,25	Mandiri	3,46	Sangat Mandiri	3,53	Sangat Mandiri
BNN Kota Bandung	3,76	Sangat Mandiri	3,56	Sangat Mandiri	3,8	Sangat mandiri
BNN Kabupaten Bandung Barat	3,66	Sangat Mandiri	3,76	Sangat Mandiri	3,76	Sangat Mandiri
BNN Kabupaten Bogor	3,25	Mandiri	3,43	Sangat Mandiri	3,5	Sangat Mandiri
BNN Kota Cimahi	3,22	Mandiri	3,54	Sangat Mandiri	3,55	Sangat Mandiri
BNN Kabupaten Cianjur	3,27	Sangat Mandiri	3,21	Mandiri	3,51	Sangat Mandiri
BNN Kabupaten Ciamis	3,30	Sangat Mandiri	3,56	Sangat Mandiri	3,59	Sangat Mandiri
BNN Kota Cirebon	3,22	Mandiri	3,12	Mandiri	3,91	Sangat mandiri
BNN Kota Depok	3,47	Sangat Mandiri	3,495	Sangat Mandiri	3,62	Sangat Mandiri
BNN Kabupaten Garut	3,26	Sangat Mandiri	3,62	Sangat Mandiri	3,78	Sangat Mandiri
BNN Kabupaten Karawang	3,59	Sangat Mandiri	3,815	Sangat Mandiri	3,6	Sangat Mandiri
BNN Kabupaten Kuningan	3,45	Sangat Mandiri	3,5	Sangat Mandiri	3,33	Sangat Mandiri
BNN Kabupaten Sumedang	3,26	Sangat Mandiri	3,365	Sangat Mandiri	3,71	Sangat Mandiri
BNN Kabupaten Sukabumi	3,87	Sangat Mandiri	3,82	Sangat Mandiri	3,83	Sangat Mandiri
BNN Kota Tasikmalaya	3,25	Mandiri	3,46	Sangat Mandiri	3,68	Sangat Mandiri



Sasaran Kegiatan 4 dan 5

Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja tersebut. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	1 Kawasan	100 %
2.	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	3,10 indeks	3,14 Indeks	101 %

Definisi dan pengukuran kinerja dari sasaran kegiatan ini adalah Status keterpulihan suatu kawasan rawan ditentukan berdasarkan indeks keterpulihan suatu kawasan rawan narkoba yang telah diintervensi program pemberdayaan alternatif.

Indikator keberhasilan ini merupakan ukuran sejauh mana intervensi program berhasil, berlanjut dan dirasakan masyarakat, dengan beberapa item pengukuran, antara lain:

1. Penyelenggaraan program;
2. Pelaksana program;
3. Keberlanjutan program;
4. Sinergi instansi pemerintah;
5. Kemitraan dunia usaha;
6. Pelibatan organisasi sosial masyarakat;
7. Hasil program yang dirasakan masyarakat.

Klasifikasi Nilai Keterpulihan Kawasan rawan (IKKR) adalah sebagai berikut :

Nilai Interval	Kriteria
1,00 – 1,75	Bahaya
1,76 – 2,50	Waspada

2,51 – 3,25	Siaga
3,26 – 4,00	Aman

Pada tahun 2024, Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" di wilayah BNN Provinsi Jawa Barat tercapai 1 kawasan dari target sebanyak 1 kawasan atau sebesar 100%. Dengan capaian indek nilai keterpulihan Kawasan rawan yang diintervensi 3,14 dari target 3,10.

Pada tahun 2023, Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" di wilayah BNN Provinsi Jawa Barat tercapai 2 kawasan dari target sebanyak 2 kawasan atau sebesar 100%. Dengan indek nilai keterpulihan Kawasan rawan yang diintervensi 2,36 dari target 3,03.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 dan 2023, capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2024 mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan adanya keselarasan dan sinergi yang baik antara Penyelenggaraan program, Pelaksana program, Keberlanjutan program, Sinergi instansi pemerintah, Kemitraan dunia usaha, kolaborasi dengan organisasi sosial masyarakat dan Hasil program yang dirasakan masyarakat. Capaian Outcome pada pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan kemauan masyarakat dalam kewirausahaan dan mampu menciptakan lingkungan bersih narkoba dalam masyarakat yang produktif, mandiri dan berkesinambungan.
2. Beralihnya profesi peserta Bimtek Lifeskill yang asalnya penyalahguna narkoba menjadi wirausaha keripik singkong di Desa Sukatani Kabupaten Purwakarta.
3. Terlaksananya pemulihan kondisi kawasan rawan narkoba Desa Sukatani Kabupaten Purwakarta (Bahaya menjadi Aman).

Strategi pencapaian yang dilakukan adalah adanya Intervensi kepada Pemda terkait anggaran untuk program Kawasan rawan - Bekerjasama dengan CSR setempat untuk menindaklanjuti program dimaksud.

Kendala yang ditemui dilapangan Tidak adanya anggaran untuk Kegiatan Pra Pelatihan Kewirausahaan seperti Kegiatan Pemetaan Potensi Kawasan Rawan yang merupakan rangkaian kegiatan untuk mendukung keberhasilan Program Pemberdayaan Alternatif secara optimal dan ddanya Perubahan Instrumen berbasis online yang menyulitkan Responden dalam pengisian kuisisioner.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	2022	2023	2024
-----	----------------------------	------	------	------

1.	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	2 Kawasan	1 Kawasan
2.	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	3,10	3,03	3,14

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah Mengalokasikan anggaran hibah untuk kegiatan pemetaan kawasan rawan memberikan sosialisasi kepada responden terkait pengisian kuisioner. Perbandingan capaian program dapat kami sajikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM	10	16	160

Sasaran Kegiatan 6

Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi

Dimensi dari pengukuran kinerja dari sasaran kegiatan ini adalah Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM.

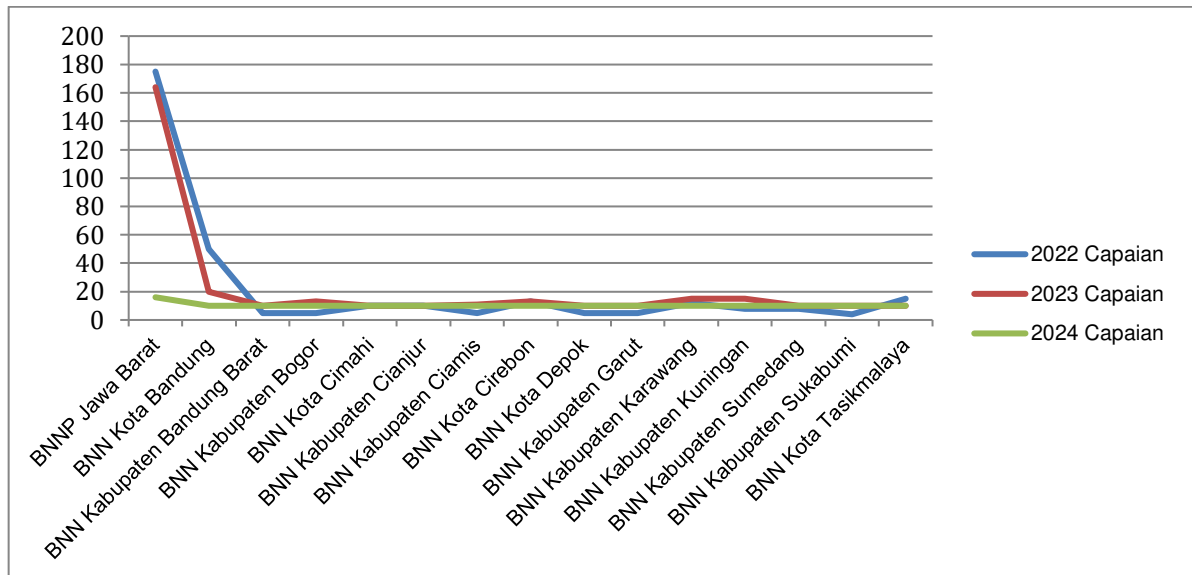
Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputy Bidang Rehabilitasi BNN.

Sedangkan untuk Petugas lembaga rehabilitasi yang bersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi adalah petugas pelaksana pelayanan rehabilitasi yang telah mengikuti peningkatan kompetensi teknis dan bersertifikasi sesuai bidangnya (dokter, perawat, konselor adiksi, psikolog, pekerja sosial). Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana pelayanan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi (baik dokter, perawat, konselor adiksi, psikolog, pekerja sosial) yang telah mengikuti dan menyelesaikan

seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan rehabilitasi narkoba dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi narkoba dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

Pada tahun 2024 Jumlah capaian target petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih di wilayah BNN Provinsi Jawa Barat terealisasi sebanyak 16 orang dari target sebanyak 10 orang atau sebesar 160%. Adapun kegiatan tersebut diselenggarakan sesuai DIPA di masing-masing satker yang ada di Wilayah Jawa Barat terhadap agen pemulihan di setiap unit IBM binaannya. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Satker	2022		2023		2024	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
BNNP Jawa Barat	100	175	150	164	10	16
BNN Kota Bandung	-	50	10	20	10	10
BNN Kabupaten Bandung Barat	-	5	10	10	10	10
BNN Kabupaten Bogor	-	5	10	13	10	10
BNN Kota Cimahi	-	10	10	10	10	10
BNN Kabupaten Cianjur	-	10	10	10	10	10
BNN Kabupaten Ciamis	-	5	10	11	10	10
BNN Kota Cirebon	-	13	10	13	10	10
BNN Kota Depok	-	5	10	10	10	10
BNN Kabupaten Garut	-	5	10	10	10	10
BNN Kabupaten Karawang	-	12	10	15	10	10
BNN Kabupaten Kuningan	-	8	10	15	10	10
BNN Kabupaten Sumedang	-	8	10	10	10	10
BNN Kabupaten Sukabumi	-	4	10	10	10	10
BNN Kota Tasikmalaya	-	15	10	10	10	10



Capaian target pada indikator ini pada tahun 2024 merupakan target dan capaian mandiri pada satker BNNP Jawa Barat. Berbeda pada capaian target tahun 2022 dan 2024 yang merupakan angka komulatif dari BNNK di wilayah Jawa Barat.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program antara lain peserta merupakan orang-orang yang masih awam terkait dunia adiksi serta materi yang harus disampaikan sangat banyak sehingga mereka membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk belajarnya

Sedangkan upaya tindaklanjut yang dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan tambahan kepada Agen Pemulihan pada saat kegiatan Asistensi

Sasaran Kegiatan 7 dan 8

Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 2 indikator yaitu Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi dan Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi. Adapun target dan realisasinya disajikan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
-----	-------------------	--------	-----------	---------

1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	4 Lembaga	4 Lembaga	100%
2.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional di wilayah provinsi	30 Unit	31 Unit	103 %

Definisi dan pengukuran kinerja dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Lembaga rehabilitasi narkoba yang memenuhi standar adalah lembaga rehabilitasi yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar layanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkoba yang telah mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) minimal kategori B (Minimal 73%).

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkoba yang telah mampu mempertahankan dan memenuhi standar layanan dalam satu tahun anggaran.

2. Unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya.

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

Beberapa hal yang menjadi kendala pelaksanaan program antara lain :

- Kurangnya dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan lembaga sehingga lembaga semakin sulit mendapatkan klien(sudah tidak ada pembiayaan untuk lembaga rehabilitasi dari kemensos,sementara kemenkes masih dalam penyusunan daftar IPWL;
- BNNP Jabar tidak lagi mendapatkan dukungan anggaran untuk pelatihan yang dapat mendukung lembaga untuk bisa memenuhi standar;

- kurangnya SDM dokter sehingga klinik BNNK hampir tidak dapat memenuhi standar minimum layanan klinik;
- Kurangnya tenaga profesional psikolog klinis. Tidak semua kabupaten/kota memiliki psikolog klinis yang praktik sehingga BNNK harus mencari kerjasama dengan psikolog klinis di luar kabupaten/kota;

Dengan konndidi tersebut diatas kami berupaya melakukan langkah-langkah :

- mendorong lembaga dan instansi terkait melalui kegiatan koordinasi IPWL ke Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk dapat memberikan penguatan lembaga;
- melakukan penguatan lembaga dengan memberikan peningkatan kemampuan melalui webinar (BNNP Jabar berinovasi dengan mengadakan 1 kali pelatihan webinar berSKP Kemenkes dengan provider LMS Plataran Sehat 2 kali webinar dengan ISSUP.
- mengkoordinir dokter-dokter P3K dan ASN di wilayah Provinsi Jawa Barat yang bersedia STRnya untuk digunakan dalam ijin klinik bagi BNNK lainnya sekaligus menerima konsultasi
- memberdayakan Psikolog Klinik di BNNP Jabar untuk dapat melakukan konsultasi dari BNNK terkait layanan psikolog klinis.

Satker	2022		2023		2024	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
BNNP Jawa Barat	-	-	30	35	30	31
BNN Kota Bandung	-	-	5	10	6	6
BNN Kabupaten Bandung Barat	-	-	1	1	1	1
BNN Kabupaten Bogor	-	-	7	9	8	8
BNN Kota Cimahi	-	-	3	4	3	3
BNN Kabupaten Cianjur	-	-	4	4	4	4
BNN Kabupaten Ciamis	-	-	3	3	1	3
BNN Kota Cirebon	-	-	5	9	2	4
BNN Kota Depok	-	-	2	2	2	2

BNN Kabupaten Garut	-	-	4	4	4	4
BNN Kabupaten Karawang	-	-	3	4	3	4
BNN Kabupaten Kuningan	-	-	1	1	1	2
BNN Kabupaten Sumedang	-	-	2	2	2	2
BNN Kabupaten Sukabumi	-	-	2	2	1	2
BNN Kota Tasikmalaya	-	-	3	4	1	3

No	Nama Lembaga	Tahun 2024	Keterangan
		KATEGORI (A/B/C)	
1	Klinik Pratama BNNK Bandung	A	Memenuhi SPM
2	Klinik Pratama BNN Cirebon	A	Memenuhi SPM
3	Klinik Pratama BNNK Sukabumi	A	Memenuhi SPM
4	Klinik Pratama BNNK Sumedang	A	Memenuhi SPM
5	Puskesmas Karawang Kota	A	Memenuhi SPM
6	Yayasan Grafiks	A	Memenuhi SPM
7	Graha Suar Indonesia	A	Memenuhi SPM
8	Klinik Karya Sehat Nusantara	A	Memenuhi SPM

Sedangkan untuk Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi yang tercapai adalah sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) unit IBM dari target 20 unit IBM atau sebesar 130% dengan rincian sebagai berikut dari:

NO	WILAYAH KERJA	CAPAIAN	UNIT IBM
1	BNNP Jawa Barat	30	35 Unit
2	BNN Kota Bandung	2	2 Unit

3	BNN Kota Cimahi	2	2 Unit
4	BNN Kota Cirebon	2	2 Unit
5	BNN Kota Depok	2	2 Unit
6	BNN Kota Tasikmalaya	2	2 Unit
7	BNN Kab. Bandung Barat	2	2 Unit
8	BNN Kab. Bogor	2	3 Unit
9	BNN Kab. Ciamis	2	2 Unit
10	BNN Kab. Cianjur	2	2 Unit
11	BNN Kab. Garut	2	2 Unit
12	BNN Kab. Karawang	2	2 Unit
13	BNN Kab. Kuningan	2	2 Unit
14	BNN Kab. Sukabumi	2	2 Unit
15	BNN Kab. Sumedang	2	2 Unit

Adapun pada tahun 2021 Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi yang tercapai adalah 8 lembaga dari target 8 lembaga atau 100% sedangkan Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi yang tercapai adalah 35 Unit IBM dari target 30 Unit IBM atau sebesar 130%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023, capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2024 mengalami kenaikan baik dari segi target maupun realisasi. Hal ini bisa tercapai karena strategi yang dilakukan oleh BNN Provinsi Jawa Barat yaitu:

1. Optimalisasi pelaksanaan bimbingan teknis di masing-masing Lembaga melalui Bimtek Virtual.
2. Membuat form self-asesmen sebagai penyaring lembaga yang sekiranya mampu untuk memenuhi SPM di tahun ini.
3. Memfokuskan kegiatan Bimtek Tatap Muka ke Lembaga yang secara self asesmen sudah memiliki nilai yang tidak jauh dari SPM.
4. Mengupayakan koordinasi yang intensif dengan para pemangku kepentingan di masing-masing unit IBM.

5. Melakukan sosialisasi dan pendekatan secara intensif dengan komunitas agar terjalin hubungan yang baik.
6. Melakukan asistensi dan pemantauan oleh petugas BNNP dengan para petugas IBM.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target adalah peserta merupakan orang-orang yang masih awam terkait dunia adiksi serta materi yang harus disampaikan sangat banyak sehingga mereka membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk belajarnya.

Sedangkan upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan tambahan kepada Agen Pemulihan pada saat kegiatan Asistensi.

Sedangkan upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan tambahan kepada Agen Pemulihan pada saat kegiatan Asistensi.

Sasaran Kegiatan 9

Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan atau Pecandu Narkotika

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	74,20%	109 %

Indikator kinerja pada sasaran ini ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan 2024, sedangkan pada tahun 2022 sasaran kegiatan dan indikator kinerja ini belum ditetapkan, namun upaya-upaya strategis dalam pencapaian target terus dilakukan.

Instrumen yang digunakan dalam mengukur kualitas hidup adalah WHOQoL yang sudah diadaptasi ke Bahasa Indonesia. Indikator klien mengalami peningkatan kualitas adalah adanya peningkatan nilai dari minimal dua dari empat domain (domain fisik,

psikologis, hubungan sosial dan lingkungan), yang diukur dalam rentang waktu minimal satu bulan.

Kendala dalam pencapaian target antara lain adalah komitmen klien dalam mengakses layanan dan menyelesaikan rawatan dalam tahapan rehabilitasi rawat jalan, serta tidak semua komponen/domain dapat meningkat karena keterbatasan proses rehabilitasi/tidak dapat diintervensi (yakni dalam domain lingkungan dan hubungan sosial). Upaya yang sudah dilakukan petugas adalah dengan melakukan pemantauan secara daring/*online*, dan memfasilitasi rujukan permasalahan sesuai kebutuhan klien.

Setelah klien menyelesaikan perawatan dalam tahapan rehabilitasi rawat jalan, klien dirujuk untuk mengikuti program pascarehabilitasi, yang dimulai dengan penilaian pascarehabilitasi, kegiatan pemantauan dan pendampingan, serta evaluasi pascarehabilitasi. Dalam tahapan ini kembali dilakukan pengukuran dan evaluasi kualitas hidup. Hasil pengukuran ini menjadi indikator dari keberhasilan program rehabilitasi.

Kendala dari pelaksanaan program pascarehabilitasi adalah komitmen klien dalam menjalani program, yang membuat petugas sulit untuk melakukan pemantauan dan pendampingan. Kendala lainnya adalah sebagai berikut:

Domain Kapital Pemulihan	Kendala	Upaya
Permasalahan produktivitas/ ketenagakerjaan dan keterampilan vokasional/ pendidikan	- Klien tidak memiliki keterampilan vokasional; - Klien tidak memiliki pengalaman kerja; - Klien tidak memiliki relasi dan jejaring untuk mendapatkan pekerjaan; - Jejaring BNN masih terbatas terkait permasalahan ketenagakerjaan.	- Inisiasi kerja sama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bandung Barat;

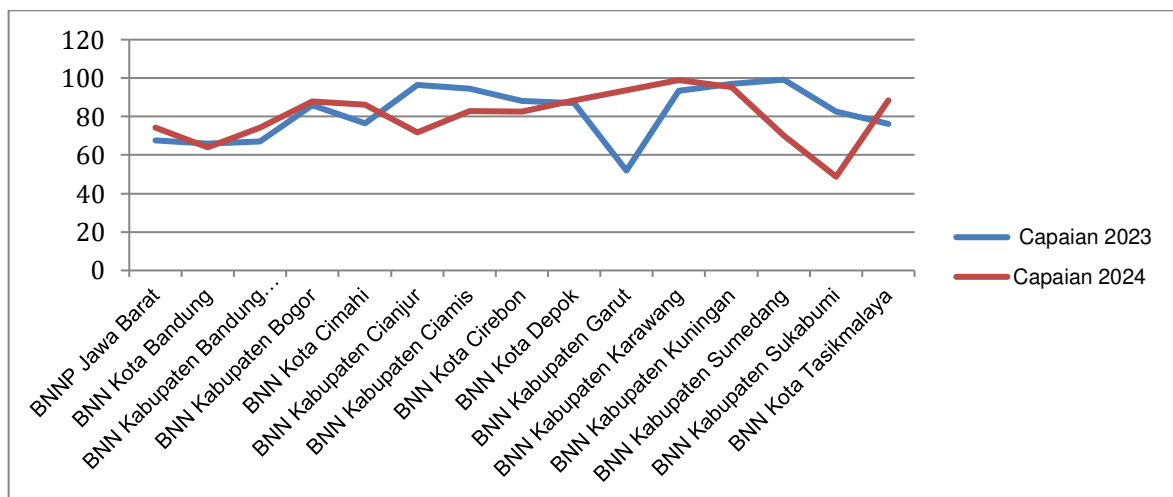
Integrasi komunitas dan dukungan budaya	- Klien sulit mencari lingkungan pertemanan baru yang bebas dari penyalahgunaan zat; - Klien sulit berbaur dalam lingkungan baru; - Masih adanya stigma dan diskriminasi di masyarakat; - Terbatasnya kelompok dukungan pemulihan.	- Memfasilitasi kelompok dukungan pemulihan; - Menginformasikan adanya kelompok dukungan pemulihan seperti SMART Recovery dan Pertemuan 12 Langkah.
Rumah aman/lingkungan yang sehat	- Klien tinggal di rumah yang tidak layak huni; - Klien tinggal di lingkungan yang rawan penggunaan zat; - Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar klien (pangan, sandang dan papan).	Yang akan dilakukan: - Kerja sama dengan Puskesmas terdekat untuk pendataan keluarga sehat; - Kerja sama dengan Dinas Sosial untuk pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) atau permasalahan kesejahteraan sosial lainnya.
Dukungan keluarga dan sosial	- Klien berasal dari keluarga yang tidak harmonis; - Rendahnya tingkat pendidikan keluarga; - Klien tidak memiliki dukungan keluarga.	- Memfasilitasi pertemuan dukungan keluarga (PDK); - Melakukan pendekatan keluarga; - Memfasilitasi klien untuk mengikuti program lanjutan di lembaga rehabilitasi (<i>individual living program/live in</i>)

Kesehatan fisik dan mental	- Tidak semua klien memiliki asuransi kesehatan yang dapat menunjang pemulihan; - Pasien dengan diagnosis NAPZA tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, sehingga menyulitkan bagi klien yang membutuhkan penanganan psikiatri lebih lanjut; - Klien belum menyadari bahwa pemulihan adalah proses/perjalanan seumur hidup. Terkadang klien merasa permasalahannya sudah selesai, setelah menjalani program rawat jalan.	- Mendorong klien untuk mengurus BPJS PBI; - Memberikan edukasi tentang kepatuhan pengobatan; - Merujuk ke layanan RSJ Provinsi Jawa Barat untuk rujukan rawat jalan NAPZA; - Melakukan advokasi ke Pemerintah Daerah agar dapat memfasilitasi akses layanan lanjutan NAPZA; - Penguatan edukasi <i>relapse prevention</i> terhadap klien dan keluarga, namun upaya ini dirasa masih belum efektif.
----------------------------	---	---

Pada tahun 2024 capaian (*outcome*) indeks persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup di wilayah Jawa Barat dari layanan rehabilitasi rawat jalan dan pascarehabilitasi adalah sebagai berikut :

Satker	2022 (Belum ditetapkan)		2023		2024	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
BNNP Jawa Barat	-	-	65	67,62	68	74,20
BNN Kota Bandung	-	-	80	65,91	68	64
BNN Kabupaten Bandung Barat	-	-	60	66,94	68	74,22
BNN Kabupaten Bogor	-	-	71	86	68	88
BNN Kota Cimahi	-	-	67	76,39	68	86,23
BNN Kabupaten Cianjur	-	-	60	96,43	68	71,88
BNN Kabupaten Ciamis	-	-	70	94,53	68	82,81
BNN Kota Cirebon	-	-	70	88,03	68	82,69

BNN Kota Depok	-	-	75	87,1	68	88,28
BNN Kabupaten Garut	-	-	70	51,92	68	93,64
BNN Kabupaten Karawang	-	-	67	93,45	68	99
BNN Kabupaten Kuningan	-	-	65	97,12	68	95,31
BNN Kabupaten Sumedang	-	-	62	99,19	68	70
BNN Kabupaten Sukabumi	-	-	62	82,69	68	48,75
BNN Kota Tasikmalaya	-	-	70	76,09	68	88,54



Saran yang dapat diberikan dalam pengukuran keberhasilan program rehabilitasi adalah penggunaan instrumen lain, selain pengukuran kualitas hidup (WHOQoL), yang dapat lebih spesifik dalam mengukur perilaku adiksi, dampak dan perubahan yang telah dicapai klien.

Sasaran Kegiatan 10

Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika

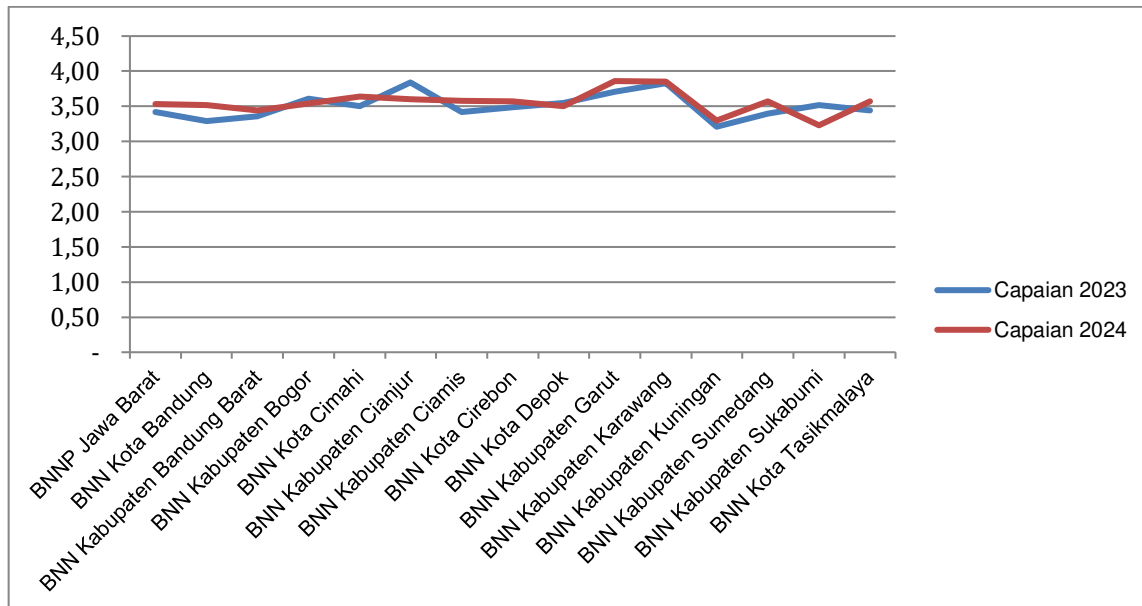
Pengukuran IKM merupakan amanat Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Survei IKM bertujuan untuk memperoleh nilai kepuasan penerima layanan rehabilitasi yang

akan menjadi dasar penyusunan kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Hasil Survei IKM 2024 yang merupakan indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,29 indeks	3,53 Indeks	103 %

Indikator Ini ditetapkan pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2022 Terdapat perubahan pada sasaran kegiatan dan indikator kinerja

Satker	2022 (Belum ditetapkan)		2023		2024	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
BNNP Jawa Barat	-	-	3,275	3,42	3,29	3,53
BNN Kota Bandung	-	-	3,20	3,29	3,06	3,52
BNN Kabupaten Bandung Barat	-	-	3,25	3,36	3,29	3,44
BNN Kabupaten Bogor	-	-	3,20	3,61	3,42	3,54
BNN Kota Cimahi	-	-	3,25	3,50	3,42	3,64
BNN Kabupaten Cianjur	-	-	3,20	3,84	3,60	3,60
BNN Kabupaten Ciamis	-	-	3,20	3,42	3,29	3,58
BNN Kota Cirebon	-	-	3,08	3,49	3,29	3,57
BNN Kota Depok	-	-	3,20	3,55	3,42	3,50
BNN Kabupaten Garut	-	-	3,20	3,71	3,60	3,86
BNN Kabupaten Karawang	-	-	3,20	3,83	3,60	3,85
BNN Kabupaten Kuningan	-	-	3,20	3,21	3,29	3,30
BNN Kabupaten Sumedang	-	-	3,20	3,40	3,29	3,57
BNN Kabupaten Sukabumi	-	-	3,30	3,52	3,50	3,23
BNN Kota Tasikmalaya	-	-	3,20	3,44	3,29	3,57



Kendala BNNP Jawa Barat dalam penyelenggaraan survei IKM adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme kuesioner yang kurang sederhana dalam keterbacaan (beberapa kalimat dalam item-item tertentu sulit untuk dimengerti), sehingga menyulitkan klien rehabilitasi untuk memahami dan multitafsir dalam menerjemahkan item dalam kuesioner;
2. Beberapa klien yang mengisi kuesioner memiliki keterbatasan dalam mengoperasikan *smartphone*, dan belum terbiasa mengisi formulir secara online, sehingga dalam pelaksanaan pengisian survei klien terlihat kurang tertarik dan memahami dengan baik item yang ada pada kuesioner;
3. Keterlambatan pemberian kuesioner kepada beberapa klien, sehingga pengisian survei sudah ditutup, sehingga tidak dapat diikuti dalam pengisian survei IKM.

Upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala/permasalahan di atas adalah:

1. Memfasilitasi klien yang mengalami kendala dalam pengisian survei IKM;
2. Memfasilitasi alat/sarana yang dapat digunakan untuk mengisi survei IKM;
3. Menyediakan kuesioner manual untuk mengantisipasi keterbatasan klien atau kendala pada aplikasi web;
4. Membuat pengendalian laju layanan sebagai upaya mengidentifikasi klien yang telah mengakses layanan minimal 3 kali, sehingga dapat dijadikan sasaran responden IKM;
5. Membuat QR Code akses link IKM dan terpasang di area yang mudah dilihat;

6. Secara kontinu mengingatkan petugas rehabilitasi untuk meminta klien mengisi survei IKM.

Dari hasil pengolahan survei IKM, PJ IKM akan membahas hasil IKM 2024 sebagai dasar rekomendasi perbaikan layanan rehabilitasi tahun 2025.

Sasaran Kegiatan 11

Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari indikator jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21. Adapun target dan realisasinya disajikan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
11.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	22 Berkas Perkara	29 Berkas Perkara	131%

Definisi dan pengukuran kinerja dari sasaran kegiatan ini adalah Berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 adalah berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkoba yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan.

Pengukurannya menggunakan cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkoba yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan dari unit Pusat dan Vertikal.

Pada tahun 2022 Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang ditangani penyidik BNNP yang sudah P-21 periode Januari s.d Desember 2022 ada 23 berkas.

Tahun 2023 Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang ditangani penyidik BNNK di 13 BNNK di Jawa Barat yang sudah P-21 adalah 35 berkas perkara dan sedangkan BNN Kab Cianjur dan BNN Kota Tasikmalaya tidak ada berkas yang P-21. berkas perkara yang sudah P-21.

Tahun 2024 BNNK di Jawa Barat yang sudah P-21 adalah 29 berkas perkara dari target 22 berrkas perkara yang sudah P-21 dengan uraian sebagai berikut: dengan uraian sebagai berikut:

Berkas Narkotika Bnnp Jawa Barat Dan BNNK Se-Jawa Barat

NO	LKN	TANGGAL LKN	SP HAN	TERSANGKA	STATUS		
					SIDIK	TAHAP 1	P21
1	LKN/0033-NAR/XII/2024/BNNP Jawa Barat	14-Des-2024		-	-		
2	LKN/0032-NAR/XII/2024/BNNP Jawa Barat	06-Des-2024	Sprin-Han/0026/XII/2024/B NNP Jawa Barat	1	AEP SAEPUDIN bin SURYANA (Alm)	TAHAP 1	
3	LKN/0031-NAR/XI/2024/BNNP Jawa Barat	08-Nov-2024	Sprin-Han/0025/XI/2024/BN NP Jawa Barat	1	BUDI IRAWAN bin CECE SUPRIATNA		P21 + TAHAP 2
4	LKN/0030-NAR/XI/2024/BNNP Jawa Barat	05-Nov-2024	Sprin-Han/0024/XI/2024/BN NP Jawa Barat	1	FADHLAN ABDURAHMAN	TAHAP 1	
5	LKN/0029-NAR/X/2024/BNNP Jawa Barat	09-Okt-2024		-	-		
6	LKN/0028-NAR/IX/2024/BNNP Jawa Barat	30-Sep-2024	Sprin-Han/0023/X/2024/BN NP Jawa Barat	1	NOVI OKTAVIANI alias NENG Binti SANDI SYAFE'I		P21 + TAHAP 2
				2	TAHIR FALAH alias TERMINATOR Bin TOTO (alm)	TAHAP 1	
				3	YANYAN YALISSHANA alias AKUY Bin YAYA	TAHAP 1	
				4	PIRJIYAWAN PERMANA als UWEK bin MAMAN LUKMAN	TAHAP 1	
7	LKN/0027-NAR/IX/2024/BNNP Jawa Barat	28-Sep-2024		-	-		
8	LKN/0026-NAR/VIII/2024/BNNP Jawa Barat	17-Aug-2024	Sprin-Han/0022/VIII/2024/B NNP Jawa Barat	1	HENDI SETIAWAN alias BRAY bin EDI SURYA DARMA		P21 + TAHAP 2
9	LKN/0025-NAR/VIII/2024/BNNP Jawa Barat	12-Aug-2024	Sprin-Han/0021/VIII/2024/B NNP Jawa Barat	1	FADHI FERREN YARDIANSYAH alias AHMAD ALBAR alias GALING bin FERRY		P21 + TAHAP 2
10	LKN/0024-NAR/VIII/2024/BNNP Jawa Barat	1-Aug-2024		-	-		
11	LKN/0023-NAR/VII/2024/BNNP Jawa Barat	5-Jul-2024		-	-		
12	LKN/0022-NAR/VI/2024/BNNP Jawa Barat	29-Jun-2024	Sprin-Han/0020/VII/2024/B NNP Jawa Barat	1	YOGI SAEPUL BAROKAH alias OGI bin ASEP YAHYA		P21 + TAHAP 2
13	LKN/0021-NAR/VI/2024/BNNP Jawa Barat	26-Jun-2024		-	-		
14	LKN/0020-NAR/VI/2024/BNNP Jawa Barat	13-Jun-2024	Sprin-Han/0019/VI/2024/BN NP Jawa Barat	1	TEDI KURNIAWAN bin ENJANG SUTIA		P21 + TAHAP 2

15	LKN/0019-NAR/VI/2024/BNNP Jawa Barat	12-Jun-2024		-	-			
16	LKN/0018-NAR/V/2024/BNNP Jawa Barat	27-May-2024		-	-			
17	LKN/0017-NAR/V/2024/BNNP Jawa Barat	14-May-2024	Sprin-Han/0018/V/2024/BN NP Jawa Barat	1	RADI RAIHAN UTAMA als RADI bin HERDI YULIMANSYAH			P21 + TAHAP 2
18	LKN/0016-NAR/V/2024/BNNP Jawa Barat	6-May-2024	Sprin-Han/0017/V/2024/BN NP Jawa Barat	1	ISEP SEPTIADI als IMUNG bin SUPARMAN (alm)			P21 + TAHAP 2
19	LKN/0015-NAR/V/2024/BNNP Jawa Barat	3-May-2024	Sprin-Han/0016/V/2024/BN NP Jawa Barat	1	IWAN KURNIAWAN als BAKO bin ADE SUKMANA			P21 + TAHAP 2
		3-May-2024	Sprin-Han/0015/V/2024/BN NP Jawa Barat	2	DINAR GUSTIA INDRA als BACENG bin DADAN KURNIADI			P21 + TAHAP 2
20	LKN/0014-NAR/IV/2024/BNNP Jawa Barat	25-Apr-2024	Sprin-Han/0014/IV/2024/BN NP Jawa Barat	1	HADIANSYAH alias IYAN bin NANA SUWARNA			P21 + TAHAP 2
21	LKN/0013-NAR/IV/2024/BNNP Jawa Barat	24-Apr-2024	Sprin-Han/0012/IV/2024/BN NP Jawa Barat	1	JAILANI ISMAIL bin ISMAIL (alm)			P21 + TAHAP 2
		24-Apr-2024	Sprin-Han/0013/IV/2024/BN NP Jawa Barat	2	SAIFUL BAHRI bin M. DAUD			P21 + TAHAP 2
22	LKN/0012-NAR/IV/2024/BNNP Jawa Barat	17-Apr-2024	Sprin-Han/0011/IV/2024/BN NP Jawa Barat	1	NUR MUHAMAD ADAM als ADAM bin H. KARSA SETIAWAN			P21 + TAHAP 2
23	LKN/0011-NAR/III/2024/BNNP Jawa Barat	26-Mar-2024		1	TEUKU ARFIANSYAH als ARFIAN bin AYUBSYAH (alm)		TAHAP 1	
		26-Mar-2024		2	DEANDRA PUTRA PRATAMA bin AGUS HARYANTO (alm)			P21 + TAHAP 2
		26-Mar-2024		3	MOHAMMAD RIVALDY bin ASEP SAEPUDIN			P21 + TAHAP 2
		26-Mar-2024	Sprin-Han/0010/III/2024/BN NP Jawa Barat	4	ANGGITTA binti ALBERT SIREGAR			P21 + TAHAP 2
24	LKN/0010-NAR/II/2024/BNNP Jawa Barat	26-Feb-2024	Sprin-Han/0009/II/2024/BN NP Jawa Barat	1	ZIAN PERMANA SUDARTO als GENDUT bin SUDARTO (alm)			P21 + TAHAP 2
25	LKN/0009-NAR/II/2024/BNNP Jawa Barat	13-Feb-2024		1	OPIK bin HERI ENDANG			P21 + TAHAP 2
		13-Feb-2024		2	NOVAL ADI CAHYA RAMADHAN als OPAL bin SAIFUL BAHRI			P21 + TAHAP 2
		13-Feb-2024		3	TRI SASTRA SLAMET RAHARJO bin SUMARTO			P21 + TAHAP 2
26	LKN/0008-NAR/I/2024/BNNP Jawa Barat	30-Jan-2024		1	KOMALUDIN als ENGKO bin DEDED SUTISNA (alm)			P21 + TAHAP 2
27	LKN/0007-NAR/I/2024/BNNP Jawa Barat	31-Jan-2024	Sprin-Han/0007/II/2024/BN NP Jawa Barat	1	ANGGA BUDI SETIAWAN bin PARYONO			P21 + TAHAP 2
28	LKN/0006-NAR/I/2024/BNNP Jawa Barat	29-Jan-2024	Sprin-Han/0006/I/2024/BN NP Jawa Barat	1	IRWAN SYAH als IRWAN bin SALEH (alm)			P21 + TAHAP 2
29	LKN/0005-NAR/I/2024/BNNP Jawa Barat	28-Jan-2024	Sprin-Han/0008/II/2024/BN NP Jawa Barat	1	HIZKIA YOSAFAT SIMANJUNTAK als KIA bin ROBERT SIMANJUNTAK			P21 + TAHAP 2
30	LKN/0004-NAR/I/2024/BNNP Jawa Barat	17-Jan-2024	Sprin-Han/0005/I/2024/BN NP Jawa Barat	1	RISKI ZULFANDRI YUSUF als AYAH SHIMA als DOK bin SALIM			P21 + TAHAP 2

31	LKN/0003-NAR/I/2024/BNN Kota Tasikmalaya	16-Jan-2024		-	-			
32	LKN/0002-NAR/I/2024/BNN Kabupaten Garut	6-Jan-2024		1	JAJANG IRAWAN als IWAN bin (alm) ACENG SUKARYA			P21 + TAHAP 2
		6-Jan-2024		2	YONO HARYONO bin (alm) APUD			P21 + TAHAP 2
		6-Jan-2024		3	PIAN PAMILUDIN als PION bin NANA SUMARNA			P21 + TAHAP 2
33	LKN/0001-NAR/I/2024/BNN Kabupaten Bogor	5-Jan-2024		1	KAMAL Bin ENDANG			P21 + TAHAP 2

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 dan 2023, capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2024 mengalami kenaikan jumlah berkas perkara p-21. Hal ini terjadi karena strategi yang dilakukan oleh BNN Provinsi Jawa Barat yaitu:

- Koordinasi yang baik dengan instansi - instansi terkait dalam menunjang kelancaran penyelesaian proses berkas perkara baik itu di Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Laboratorium Forensik ataupun lainnya.
- Meningkatkan kemampuan bagi anggota lapangan dan penyidik dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan berbagi pengetahuan / pengalaman.
- Pengajuan anggaran ke BNN RI guna pelaksanaan beberapa kegiatan penyelidikan dan pemberkasan yang tidak bisa masuk dalam anggaran 2024 dikarenakan melebihi target dan anggaran sudah habis

Sasaran Kegiatan 12

Meningkatnya Pemetaan Jaringan Sindikat Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika yang berhasil dipetakan Adapun target dan realisasinya disajikan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1 Peta Jaringan	1 Peta Jaringan	100%

--	--	--	--	--

Definisi dan pengukuran kinerja dari sasaran kegiatan ini adalah Peta jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah gambaran dari satu atau beberapa jaringan sindikat narkoba yang memiliki/memproduksi mengedarkan/menyelundupkan narkoba dan prekursor narkoba. Pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah satu atau lebih uraian anggota jaringan yang melakukan kegiatan/aktivitas menyelundupkan/mengedarkan memproduksi/memiliki narkoba dan prekursor narkoba dengan peran yang berbeda-beda yang didalamnya terdapat risalah jaringan yang uraikan secara detail, sehingga penggambaran satu jaringan dapat diketahui secara utuh. Laporan Informasi Intelijen adalah laporan dari satu atau lebih hasil analisis IT dan penyelidikan taktis (tim lapangan) mengenai aktivitas orang yang terkait dalam jaringan sindikat narkoba dan prekursor narkoba baik lokal maupun internasional yang diduga mengarah kepada peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang akan menjadi bahan kebijakan Pimpinan.

Pengukurannya dilakukan dengan cara mengakumulasi jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang telah berhasil dipetakan berdasarkan data laporan informasi intelijen dari unit pusat dan vertikal.

Dari target 1 Peta Jaringan BNNP Jabar sudah berhasil memetakan 1 Peta Jaringan dan 3 Laporan Informasi Intelijen terkait sindikat yang beroperasi di wilayah Jawa Barat.

Pada tahun 2022 Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba yang berhasil dipetakan adalah 2 jaringan dari target 1 jaringan atau sebesar 200%. Kegiatan ini dilaksanakan Selama bulan Januari s.d Desember 2022 dan berhasil melakukan 10 kali ungkap kasus kasus narkoba dengan 2 jaringan peredaran gelap narkoba.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 dan 2023 capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2024 mengalami perubahan Hal ini terjadi adanya perubahan pada porsi refocusing anggaran sehingga pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba kurang maksimal terpetakan, Kurangnya alat pendukung dalam pengungkapan kasus peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Upaya yang dilakukan adalah Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan peta kerawanan tindak pidana dan peredaran gelap narkoba, Menyiapkan pelatihan kepada sumber daya / personil intelijen yang terus menerus dalam melakukan pendekatan, penggalangan kepada provider-provider, TNI, POLRI, Bea Cukai, Kantor Pos, instansi-instansi pemerintahan, dan seluruh lapisan masyarakat

Sasaran Kegiatan 13 dan 14

Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Narkoba

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Jawa Barat tahun 2024 yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100%
2.	Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkoba dan Non Narkoba	100	100	100%

Definisi dan pengukuran kinerja dari sasaran kegiatan ini adalah:

1. Tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan adalah kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan yang meliputi: tidak adanya tahanan kabur, perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas.

Pengukurannya dengan mendata kejadian tahanan yang kabur, kejadian perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan kejadian hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas di lingkungan Rumah Tahanan BNN. Adapun rumus penghitungan indikator kinerja ini sebagai berikut:

K3T = Nilai Keamanan, Ketertiban dan Keselamatan Tahanan

a = Jumlah tahanan yang kabur

b = Jumlah tahanan yang menderita cedera serius atau kematian akibat perkelahian

c = Jumlah tahanan yang meninggal akibat kelalaian petugas

Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan berada pada range 1 s.d. 100. Maka:

$$K3T = \left[\frac{\text{Jumlah seluruh tahanan} - (a+b+c)}{\text{Jumlah seluruh tahanan}} \times 100\% \right] \times 100$$

2. Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba adalah kondisi keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara wajar (secara alamiah/kimiawi) pada barang bukti narkoba dan non-narkoba.

Pengukurannya dengan membandingkan data kondisi barang bukti narkoba dan non-narkoba pada saat diterima dari penyidik dengan waktu dikeluarkan untuk proses pemusnahan atau diserahkan untuk tahap penuntutan (tahap II). Penghitungan kinerja nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba adalah:

Satuan pengukuran adalah per-BA penitipan dan BA pengeluaran. Jika jumlah dan jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan barang bukti dan BA pengeluaran, maka diperoleh nilai $a = 1$, jika terdapat perbedaan baik jumlah maupun jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan dan BA pengeluaran, maka $a = 0$

KKB = Nilai Keamanan Barang Bukti

a1 = untuk barang bukti 1;

a2 = untuk barang bukti 2;

ay = dst.

Nilai tingkat keamanan barang bukti berada pada range 1 s.d. 100 Maka:

$$KBB = \left[\frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_y}{y} \times 100\% \right] \times 100$$

Selama periode tahun 2022 sampai dengan 2024 Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan adalah 100 dari target 100 atau sebesar 100%. hal ini bisa tercapai karena Terlaksanannya kegiatan Penjagaan Tahanan, keamanan pengiriman tersangka, pemeriksaan kesehatan kepada semua tahanan dan Terlaksanannya Perawatan pengawasan dalam waktu 1x24 Tahanan selama di tahan di Rutan BNNP Jabar

Dan untuk nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika adalah 100 dari target 100 atau sebesar 100%. Hal ini bisa tercapai karena adanya pengawasan yang ketat pada saat pengawalan dan pengiriman BB Narkotika dalam proses penyidikan dan pengamanan BB dlm proses penimbangan BB Narkotika.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022, 2023 dan 2024, capaian indicator kinerja kegiatan tahun 2024 memiliki nilai yang maksimal yaitu 100, hal ini menunjukkan bahwa SOP dalam penanganan tahanan dan Barang bukti narkotika dan non narkotika berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

Sasaran Kegiatan 15 dan 16

Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Jawa Barat tahun 2024 yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Barat	98,50 Indeks	98,70	100,2%
2.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	14 Kab/Kota	10 Kab/kota	71%

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian Negara/Lembaga pada tahun 2024 memiliki 8 indikator yang terfokus pada 3 aspek yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran, dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran.

Formula perhitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

No.	ASPEK KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN 20%	No.	ASPEK KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN 55%	No.	ASPEK KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN 25%
1.	Revisi DIPA (10%)	1.	Penyerapan Anggaran (20%)	1.	Capaian Output 25%
2.	Deviasi Halaman III DIPA (10%)	2.	Data Kontrak (10%)		
		3.	Penyelesaian Tagihan (10%)		
		4.	Pengelolaan UP dan TUP (10%)		
		5.	Dispensasi SPM (5%)		

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Es I/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada Satker/Es I/K/L tidak terdapat data transaksi untuk Satker tertentu

Pada tahun 2024 nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Barat tercapai 98,70 dari target 98,50 atau sebesar 100% seperti yang terlihat dalam gambar dibawah ini:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai dengan DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Unit Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman II DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Konstruktual	Penyelesaian Tagihan	Pengadaan UP dan TUP	Geseran Output				
1	022	088	002469	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100,00	100,00	97,67	92,00	100,00	98,63	100,00	98,70	100%	0,00	98,70
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	15,00	19,53	9,20	10,00	9,96	25,00				
					Nilai Aspek	100,00		97,33				100,00				

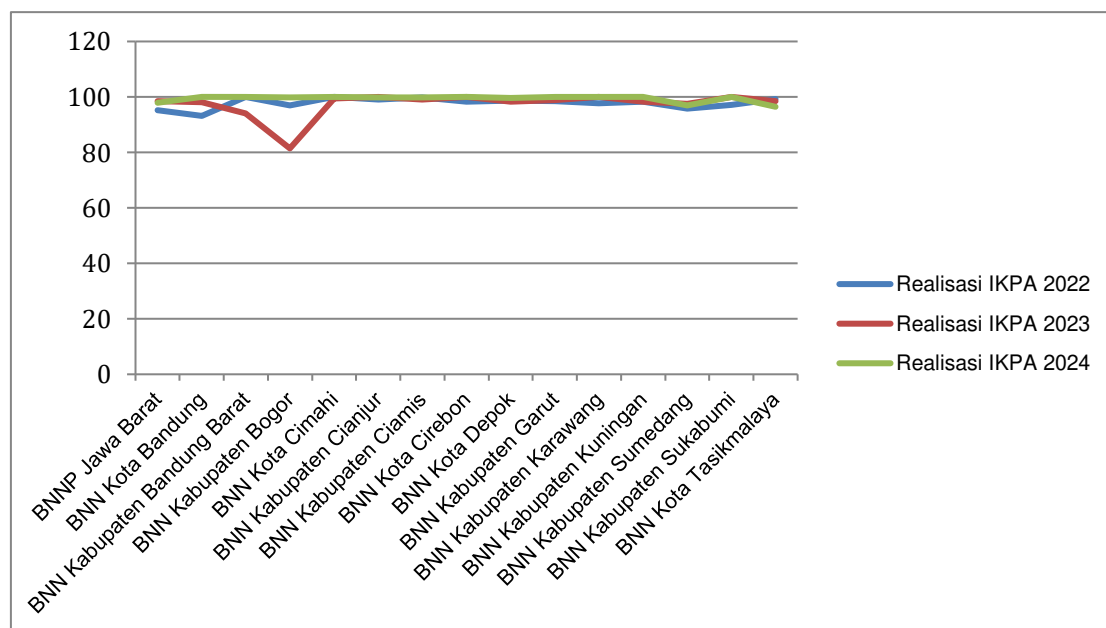
Sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id>

Sedangkan Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target sebanyak 10 Kab/Kota dari target sebanyak 14 Kab/Kota atau sebesar 71% dengan rincian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kab/Kota adalah sebagai berikut:

Satker	Target IKPA 2022	Realisasi IKPA 2022	Target IKPA 2023	Realisasi IKPA 2023	Target IKPA 2024	Realisasi IKPA 2024
BNNP Jawa Barat	95	95,14	92	98,46	98,50	98,70
BNN Kota Bandung	95	93,16	92	98	98,1	99,97
BNN Kabupaten Bandung Barat	95	99,99	92	94,01	94,65	100
BNN Kabupaten Bogor	95	96,95	92	81,44	94,65	99,90
BNN Kota Cimahi	95	99,97	92	99,48	99,58	100
BNN Kabupaten Cianjur	95	99,10	92	100	100	99,82
BNN Kabupaten Ciamis	95	99,88	92	98,96	99,05	99,88
BNN Kota Cirebon	95	98,37	92	100	100	99,97
BNN Kota Depok	95	98,64	92	98,19	98,29	99,70
BNN Kabupaten Garut	95	98,52	92	98,83	98,83	100

BNN Kabupaten Karawang	95	97,72	92	99,99	99,99	100
BNN Kabupaten Kuningan	95	98,31	92	98,34	98,44	99,99
BNN Kabupaten Sumedang	95	95,76	92	97,57	97,64	96,95
BNN Kabupaten Sukabumi	95	97,04	92	100	100	100
BNN Kota Tasikmalaya	95	99,22	92	98,40	98,50	96,45

Tahun 2024 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Barat tercapai 98,70 dari target 98,50 atau sebesar 100,2% sedangkan Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target sebanyak 10 kab/kota dari target sebanyak 14 Kab/Kota atau sebesar 71%



Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dan 2022, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Barat tahun 2024 mengalami kenaikan. Keberhasilan tercapainya target kinerja tersebut disebabkan oleh:

1. Adanya peningkatan pemahaman pegawai di BNN Provinsi Jawa Barat terkait 8 indikator dari 3 aspek dalam pengukuran IKPA.
2. Adanya sosialisasi terkait peningkatan IKPA dari kementerian terkait yaitu Kemenkeu dalam hal ini Direktur Jenderal Perbendaharaan Kanwil Jawa Barat dan KPPN Bandung I.

3. Adanya sinergitas dari Para pegawai di lingkungan BNN Provinsi Jawa Barat mulai dari bagian umum dan bagian teknis di BNN Provinsi Jawa Barat sehingga nilai IKPA mengalami peningkatan dan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Sasaran Kegiatan 17 dan 18

Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja secara Efektif dan Efisien

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Barat	87 Indeks	98,95 Indeks	113%
2.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100%

Definisi operasional

Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks.

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN diperoleh berdasarkan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran . Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran mencakup Revisi DIPA, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian tagihan, Dispensasi SPM. Deviasi Halaman III DIPA, Belanja Konraktual, Pengelolaan UP dan TUP dan Capaian Output. Sedangkan Nilai Kinerja perencanaan anggaran terdiri dari CRO, Penggunaan SBK dan Nilai Efisiensi SBK. Secara detail Kedua indikator Penilaian NKA ini kami sajikan sebagai berikut :



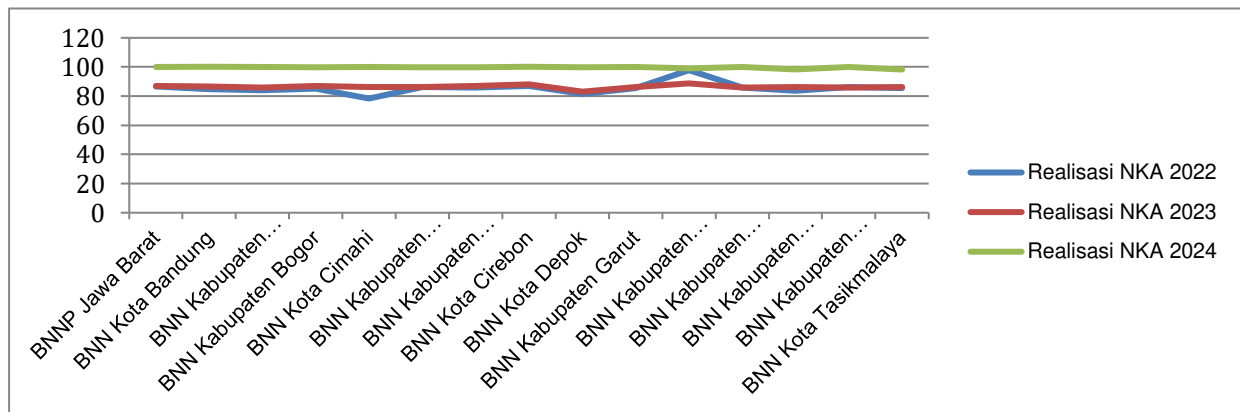
Konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan diinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2024 Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Barat tercapai 100 indeks dari target 87 indeks atau sebesar 100% sedangkan Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target sebanyak 14 kab/kota dari target sebanyak 14 Kab/Kota atau sebesar 100%

Pada tahun 2023 Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Barat tercapai 86,89 indeks dari target 87 indeks atau sebesar 99,87% sedangkan Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target sebanyak 9 kab/kota dari target sebanyak 14 Kab/Kota atau sebesar 64,28% dengan rincian indeks Nilai Kinerja anggaran BNN Kab/Kota sebagai berikut:

Satker	Target NKA 2022	Realisasi NKA 2022	Target NKA 2023	Realisasi NKA 2023	Target NKA 2024	Realisasi NKA 2024
BNNP Jawa Barat	87	86,61	87	86,89	87	98,95
BNN Kota Bandung	87	84,69	85	86,69	87	99,99
BNN Kabupaten Bandung Barat	87	84,22	85	85,92	86	100
BNN Kabupaten Bogor	87	85,31	86	87,04	88	99,95
BNN Kota Cimahi	87	78,35	80	86,37	87	100
BNN Kabupaten Cianjur	87	86,26	87	86,40	87	99,91
BNN Kabupaten Ciamis	87	85,81	86	86,88	87	99,94
BNN Kota Cirebon	87	87,01	88	87,89	88	99,99
BNN Kota Depok	87	81,47	82	83,06	84	99,85
BNN Kabupaten Garut	87	85,46	86	86,22	87	100
BNN Kabupaten Karawang	90	97,83	92	88,73	89	98,91
BNN Kabupaten Kuningan	87	85,83	86	85,82	86	100
BNN Kabupaten Sumedang	87	83,73	84	86,16	87	98,48
BNN Kabupaten Sukabumi	87	86,39	87	85,98	86	100
BNN Kota Tasikmalaya	87	85,69	86	86,23	87	98,23

Grafik Perbandingan capaian NKA dari tahun 2022 sampai dengan 2023 dapat kami sajikan sebagai berikut :



Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dan 2023, nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Jawa Barat tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup baik. Kenaikan ini disebabkan oleh:

1. Adanya peningkatan pemahaman pegawai di BNN Provinsi Jawa Barat terkait indikator dari Nilai Kinerja Anggaran.
2. Adanya koordinasi dengan Pembina fungsi, Kemenkeu dalam hal ini Direktur Jendral Perbendaharaan Kanwil Jawa Barat dan KPPN Bandung I sehingga langkah2 untuk mencapai target nilai kinerja anggaran dapat ditingkatkan.
3. Adanya sinergitas dari Para pegawai dilingkungan BNN Provinsi Jawa Barat sehingga nilai kinerja anggaran mengalami peningkatan.
4. Adanya penetapan pada nilai Standar Biaya Keluaran yang ditetapkan oleh BNN RI pada belanja kegiatan Penyelenggaran Kehumasan dan Keprotokolan.

Sasaran Kegiatan 19

Meningkatnya Pengelolaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Vertikal

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	83 Indeks	83 Indeks	100%

Zona Integritas merupakan sebutan yang diberikan kepada kementerian, lembaga yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat dan komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2024 BNNP Jawa Barat mendapatkan target kinerja pembangunan Zona Integritas sebagai komitmen pelayanan publik yang tefektif, efisien, unggul transparan dan akuntabel dengan target angka 83 indeks dan capaian realisasi berdasarkan penilaian internal mencapai 83 indeks atau capaian 100% dari target.

Hal ini selaras dengan indeks kepercayaan masyarakat terhadap BNN Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 sebesar 87,3 dengan kategori “Baik” dan indeks berdasarkan pengalaman masyarakat yang pernah menerima layanan dari BNNP di wilayah Indonesia dalam indkes kepercayaan “Sangat Baik” (Buku Hasil Pengukuran Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap BNN tahun 2024, Pusat Penelitian, Data dan Informasi BNN)

B. Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2024 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat beserta BNNK jajaran mendapatkan alokasi anggaran (sesuai Pagu Anggaran di Perjanjian Kinerja BNNP Barat) sebesar 51.319.872.000,- (Lima puluh satu milyar tiga ratus Sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi anggaran Rp.50.311.414.571,- (Lima puluh milyar tiga ratus sebelas juta empat ratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) atau sebesar 98,03%

Tahun	Pagu	Realisasi	%	Sisa Akhir Pagu
2020	52.140.029.000	51.787.930.000	99,32	352.099.000
2021	47.322.756.000	46.745.337.461	98,78	577.418.539
2022	51.713.232.000	51.482.219.435	99,55	231.012.565
2023	23.689.221.000	23.529.430.955	99,33	159.790.045
2024	51.945.157.000	50.311.414.571	96,85	1.633.742.429

**REALISASI ANGGARAN & CAPAIAN OUTPUT
BNN WILAYAH JAWA BARAT
PERIODE SAMPAI 27 DESEMBER 2024**

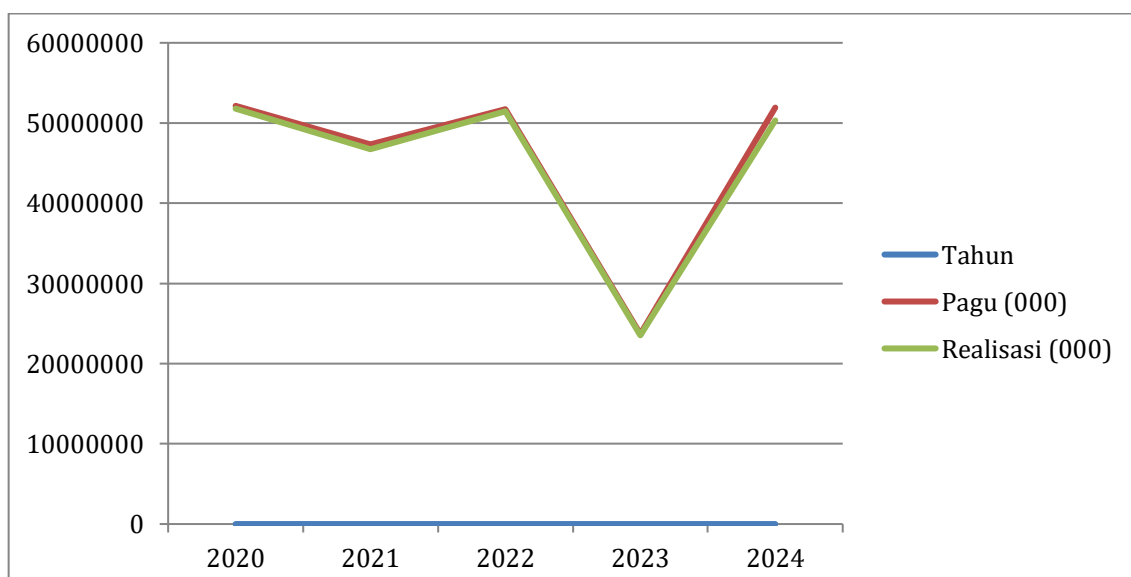
NO	NAMA SATKER	TOTAL PAGU	REALISASI		TOTAL OUTPUT	REALISASI	
			TOTAL PENYERAPAN	%		OUTPUT	%
1	BNNP JABAR	25.433.416.000	24.051.766.355	94,57%	1.094	1.225	111,97%
2	BNNK Cirebon	1.924.795.000	1.923.804.268	99,95%	522	570	109,20%
3	BNNK Bogor	2.400.050.000	2.395.304.351	99,80%	453	450	99,34%
4	BNNK Sumedang	1.702.207.000	1.697.450.255	99,72%	587	595	101,36%
5	BNNK Cimahi	1.779.878.000	1.774.637.370	99,71%	630	646	102,54%
6	BNNK Sukabumi	1.987.353.000	1.981.060.694	99,68%	283	312	110,25%
7	BNNK Karawang	1.759.701.000	1.751.396.242	99,53%	800	824	103,00%
8	BNNK Bandung	2.205.483.000	2.192.476.724	99,41%	815	859	105,40%
9	BNNK Garut	2.046.266.000	2.032.013.405	99,30%	754	792	105,04%
10	BNNK Cianjur	2.047.142.000	2.031.680.789	99,24%	506	536	105,93%
11	BNNK Bandung Barat	1.513.605.000	1.501.267.108	99,18%	200	248	124,00%
12	BNNK Tasikmalaya	1.721.757.000	1.692.102.592	98,28%	308	359	116,56%
13	BNNK Ciamis	1.706.443.000	1.675.328.480	98,18%	409	467	114,18%
14	BNNK Kuningan	1.691.253.000	1.645.736.932	97,31%	250	261	104,40%
15	BNNK Depok	2.025.808.000	1.965.389.006	97,02%	1.284	1.312	102,18%
TOTAL		51.945.157.000	50.311.414.571	96,85%	8.895	9.456	106,31%

MOTOKAR
Monitoring Output Terkait Kinerja Anggaran

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

INDONESIA
BERSINAR

Sejak tahun 2020 hingga 2023 realisasi anggaran di BNNP Jawa Barat dan BNNK Jajaran selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2024 terdapat penurunan realisasi belanja hal ini karena ada sisa pada belanja pegawai yang signifikan yang mempengaruhi nilai penyerapan pada akhir tahun anggaran.



Selain itu capaian realisasi tahun 2024 96,85%. Hal ini menjadi tantangan kedepannya dikarenakan BNNP Jawa Barat harus bisa mempertahankan capaian tersebut.

NO	OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	1.285.000.000	1.289.503.000	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	14 Kabupaten /Kota	13 Kabupaten /Kota
2	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	1.604.700.000	1.484.582.000	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	14 Kabupaten /Kota	14 Kabupaten /Kota
3	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	3.285.632.000	2.818.513.000	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	14 Kabupaten /Kota	14 Kabupaten /Kota
4	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	84.600.000	76.670.000	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	1 Kawasan
				Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan	3,1	3,14
5	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	226.575.000		Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	140 Orang	156 Orang

6	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	2.558.993.000		Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	4 Lembaga	4 Lembaga
				Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional	30 Unit	31 Unit
7	Kegiatan Pasca Rehabilitasi Penyalahgunaan dan/atau Pecandu Narkoba	228.775.000		Persentase penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %	74,20 %
				Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,29 indeks	3,53 indeks
9	Kegiatan Penyelidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	920.000.000		Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	22 Berkas	29 Berkas
10	Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	220.000.000		Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	1 Peta Jaringan	1 Peta Jaringan
11	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	491.810.000	474.805.000	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100
12	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan	20.078.100.000	16.113.692.143	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi	98.50 indeks	98,70 indeks

	Keuangan			Jawa Barat		
				Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	14 BNN Kabupaten /Kota	10 BNN Kabupaten /Kota
13	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	186.770.000				
14	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	198.331.000		Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Barat	87	98,95
				Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	14 BNN Kabupaten /Kota	14 BNN Kabupaten /Kota
15	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	20.011.116.000		-	-	-
16	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	160.000.000	426.713.480	-	-	-
JUMLAH		54.977.592.000	54.625.103.441			

BAB IV

PENUTUP

BNN Provinsi Jawa Barat secara umum telah melaksanakan target kinerja selama tahun 2024 dan disampaikan pertanggungjawabannya melalui Laporan Kinerja BNN Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Jawa Barat dan Kepala BNN RI yang berisi 16 (lima belas) Sasaran Kegiatan dan 19 (sembilanbelas) Indikator Kinerja, tingkat capaiannya dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok yaitu:
 - a. Capaian **melebihi target** kinerja yang ditetapkan sebanyak 8 indikator kinerja yaitu:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	101%
2	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	160%
3	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	103%
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	109%
5	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	107%

6	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	131%
7	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Barat	100,2%
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	114%
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	140%

b. Capaian **sesuai target** kinerja yang ditetapkan sebanyak 7 indikator kinerja yaitu:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN
1	2	3	4
1.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	100%
2.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	100%
3.	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	100%
4.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	100%

5.	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	100%
6.	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100%
7.	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100%

c. Capaian yang kurang/dibawah dari target kinerja yang ditetapkan sebanyak 3 indikator kinerja yaitu:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN
1	2	3	4
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	93%
2.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan nilai IKPA mencapai target	71%
3.	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Mencapai zona integritas BNN berdasarkan penilaian internal	87,25%

2. Langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja:

- Perubahan target kinerja sebagai kebijakan dari pembina fungsi akan diikuti dengan revisi Perjanjian Kinerja.
- Adanya kesempatan yang luas untuk mengikuti pengembangan kapasitas berupa pendidikan pelatihan/bimtek bagi seluruh personil BNN Provinsi Jawa Barat.
- Optimalisasi koordinasi dan Kerjasama ke seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan bidang tugas.

- d. Peningkatan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan lain, agar berperan aktif dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional.

LAMPIRAN